

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS LURAH DALAM MELAKUKAN
PEMBINAAN TERHADAP LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI
KELURAHAN BUKIT BATREM KECAMATAN DUMAI TIMUR KOTA
DUMAI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau
Pekanbaru**

DEAN IRAWAN

NPM : 137310043

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2019

**EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS LURAH DALAM MELAKUKAN
PEMBINAAN TERHADAP LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI
KELURAHAN BUKIT BATREM KECAMATAN DUMAI TIMUR KOTA
DUMAI**

ABSTRAK

Dean Irawan

Kata kunci : Evaluasi, Pelaksanaan Tugas Lurah, Membina Lembaga
Kemasyarakatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil pelaksanaan tugas Lurah dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dikelurahan Bukit Batrem Kecamatan Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai. Tipe penelitian yang penulis gunakan yaitu tipe Survey Descriptif, dimana penulis akan menggambarkan kondisi secara objektif yang ditemui dilapangan berdasarkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan pelaksanaan tugas lurah dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Bukit Batrem kecamatan Dumai Timur Kota Dumai. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Lurah Bukit Batrem, Pegawai Kantor Lurah Bukit Batrem, Anggota Lembaga Kemasyarakatan Bukit Batrem. Berdasarkan hasil kuisioner dan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada responden maka Pelaksanaan Tugas Lurah dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai yaitu dikatakan Cukup Baik. Hal ini dapat dilihat dari ke enam indikator yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan sehingga dapat dikatakan Baik dengan hasil rekapitulasi responden sebanyak 56 jawaban atau 45%. Dan hambatan dalam pelaksanaan tugas lurah dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dikelurahan Bukit Batrem kecamatan Dumai Timur Kota Dumai adalah kurangnya sarana dan prasarana bagi lembaga kemasyarakatan, seperti kantor-kantor untuk lembaga tersebut, meskipun demikian anggota lembaga kemasyarakatan melakukan pekerjaan semaksimal mungkin dengan sarana yang ada, dan juga masih kurangnya dana/anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk kelurahan tersebut, sehingga Lurah kurang dalam menyediakan sarana dan prasarana, dan menjadi penghambat bagi anggota lembaga kemasyarakatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan

**EVALUATION OF THE LURAH TASK FORCE IN CONDUCTING
GUIDANCE ON CIVIL SOCIETY ORGANIZATION IN BUKIT BATREM
URBAN VILLAGE, EAST DUMAI SUB-DISTRICT, DUMAI CITY.**

ABSTRACT

Dean Irawan

Keywords: Evaluation, Implementation of Village Head Duties, Fostering Community Institutions

This study aims to determine the results of the implementation of the Lurah task in conducting guidance on community institutions in the Bukit Batrem sub-district of Dumai Timur Subdistrict, Dumai City. The type of research that I use is the type of Descriptive Survey, where the writer will describe the conditions objectively encountered in the field based on data relating to the problem of implementing the lurah task in guiding community organizations in Bukit Batrem Village, Dumai Timur sub-district, Dumai City. As for the population in this study are the Bukit Batrem Village Chief, Employee of the Bukit Batrem Village Head, a member of the Bukit Batrem Community Institution. Based on questionnaires and the results of interviews that the author did to the respondent, the Implementation of the Lurah Task in Conducting Guidance on Community Institutions in the Bukit Batrem Village, Dumai Timur District, Dumai City, was said to be Good enough. This can be seen from the six indicators, namely effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, responsiveness, and accuracy so that it can be said to be good with the results of the respondents' recapitulation of 56 answers or 45%. And the obstacles in the implementation of the lurah's task in guiding community organizations in the Bukit Batrem sub-district of Dumai Timur, Dumai City are the lack of facilities and infrastructure for social institutions, such as offices for these institutions, however members of social institutions do the maximum possible work with existing facilities and also the lack of funds / budget provided by the government for the kelurahan, so that the Lurah is lacking in providing facilities and infrastructure, and is a barrier for members of community organizations to carry out activities

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunianya, shalawat serta salam senantiasa atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW sehingga dapat menyelesaikan penulisan usulan penelitian ini.

Pada kesempatan ini penulis membuat skripsi dengan judul **“Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai”**. skripsi ini di ajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau (UIR).

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penulisan ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan petunjuk, dorongan, dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, SH, MCL. Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan penulis dalam menimba ilmu pada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau ini.
2. Dr.H. Moriss Adidi Yogia, S.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.

3. Bapak Budi Muliando, S.Ip., M.Si selaku ketua jurusan pada Fakultas Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. H. Syafhendry, M. Si selaku Dosen Pembimbing 1 dan Bapak Yendri Nazir selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memantau Penulis dalam meluangkan waktu, pikiran dan tenaga demi kesempurnaan Penelitian ini.
5. Bapak dan Ibu segenap Dosen atau Asisten yang telah banyak memberikan berbagai ilmu dan akhirnya dapat dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini dan Bapak/Ibu serta Saudara/Saudari segenap Staf dan Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran penyelesaian skripsi ini.
6. Terkhusus buat keluarga tercinta Ayahanda “IRWAN” dan ibunda “DELFIA AHMAD” yang telah dengan pengertian dan kesabarannya senantiasa mendoakan, memberikan inspirasi, semangat, dukungan, support serta bantuan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis dengan bermohon kepada Allah SWT semoga keluarga tercinta saya selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungannya.
7. Dan untuk rekan-rekan seangkatan saya yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu-persatu, dan teman saya Puput Dewi Asiah, Karmila Sari, dan Novia Pisanandar yang telah membantu, mendukung dan menyelesaikan skripsi ini, semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungannya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan baik dari segi isi maupun penulisan. Hal ini karena keterbatasan kemampuan cakrawala berfikir serta keterbatasan waktu dan kesempatan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari Bapak/Ibu Dosen selaku Pembimbing dan Penguji. Akhirnya penulis

berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembacanya.

Pekanbaru, 26 Juni 2019

DEAN IRAWAN



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
SK. TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
1. Tujuan penelitian	12
2. Kegunaan penelitian	12
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	14
A. Studi Kepustakaan	14
B. Penelitian Terdahulu	28
C. Kerangka Pikir	30
D. Konsep Operasional.....	31
E. Operasional Variabel	33
F. Teknik Pengukuran.....	34

BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Tipe Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	37
C. Populasi dan Sampel.....	37
D. Teknik Penarikan Sampel	38
E. Jenis dan Sumber Data.....	39
F. Teknik Pengumpulan Data	39
G. Teknik Analisis Data	40
H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian	41
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN	43
A. Keadaan Geografis.....	43
B. Keadaan Penduduk	43
C. Struktur Organisasi Kelurahan Bukit Batrem.....	46
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Identitas Responden.....	51
B. Hasil dan Pembahasan	53
C. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Tugas Lurah dalam melakukan Pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai	77
BAB VI : PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR KEPUSTAKAAN	81
LAMPIRAN.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Bentuk Pembinaan Lurah dalam Melakukan Pembinaan dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai	9
1.2 Daftar Pekerjaan Ibu-Ibu	11
2.1 Tabel Penelitian Terdahulu	29
2.2 Operasional Variabel Penelitian Tentang Evaluasi Tugas Lurah dalam Melakukan Pembinaan di Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai	33
3.1 Populasi dan Sampel Penelitian.....	38
3.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	41
4.1 Keadaan Penduduk.....	44
4.2 Jenis dan Jumlah Mata Pencaharaan.....	44
4.3 Jumlah penduduk menurut penganut Agama.....	45
4.4 Tingkat Pendidikan masyarakat di Bukit Batrem.....	46
5.1 Identitas Responden Menurut Tingkat Usia.....	52
5.2 Identitas Responden Menurut jenis kelamin.....	52
5.3 Identitas Responden Menurut tingkat pendidikan.....	53
5.4 Tanggapan Responden (Pegawai).....	54
5.5 Tanggapan Responden (Anggota Lembaga kemasyarakatan).....	56
5.6 Tanggapan Responden (Pegawai).....	58
5.7 Tanggapan Responden (Anggota Lembaga kemasyarakatan).....	60
5.8 Tanggapan Responden (Pegawai).....	62

5.9	Tanggapan Responden (Anggota Lembaga kemasyarakatan).....	63
5.10	Tanggapan Responden (Pegawai).....	66
5.11	Tanggapan Responden (Anggota Lembaga kemasyarakatan).....	67
5.12	Tanggapan Responden (Pegawai).....	69
5.13	Tanggapan Responden (Anggota Lembaga kemasyarakatan).....	70
5.14	Tanggapan Responden (Pegawai).....	73
5.15	Tanggapan Responden (Anggota Lembaga kemasyarakatan).....	74
5.16	Rekapitulasi Tanggapan Responden.....	76



DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1	Kerangka Pemikiran Tentang Evaluasi Tugas Lurah Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai	30
4.1	Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Bukit Batrem.....	50



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Data Telly Pegawai Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai	84
2. Data Telly Anggota Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai	85
3. Dokumentasi Foto Saat Melakukan Penelitian	86



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi tersebut dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Pemerintah Daerah DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hal ini sejalan dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dimana daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tujuan dibentuknya pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah melalui pasal 1 point (1) dikatakan bahwa “pemerintah pusat selanjutnya disebut dengan pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Sedangkan dalam pasal 1 point (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah “Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Dalam pasal 229 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa kelurahan dibentuk dengan Perda kabupaten/kota berpedoman pada peraturan pemerintah. Selanjutnya dalam pasal 229 ayat 2 dikatakan kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 di jelaskan bahwa tugas lurah yaitu :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan.
- b. Pemberdayaan masyarakat.
- c. Pelayanan masyarakat.

- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 dijelaskan bahwa tugas lurah yaitu :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan.
- b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat.
- d. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Dapat kita lihat berdasarkan Peraturan Pemerintahan pada Nomor 73 tahun 2005 terdapat tugas lurah yaitu melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan, sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 Tidak ada tugas lurah melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan.

Tugas yang diemban oleh lurah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 adalah melakukan pembinaan lembaga kemasyarakatan ditingkat kelurahan. Hal ini dikarenakan lembaga kemasyarakatan merupakan pelaksana organisasi yang bersifat kolektif mewakili organisasi ke dalam dan keluar, dalam melaksanakan tugas pemberdayaan masyarakat kelurahan juga bertanggung jawab kepada lembaga musyawarah kelurahan.

Lembaga kemasyarakatan kelurahan juga merupakan organisasi terendah dalam struktur organisasi sebagai pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat ditingkat kelurahan sehingga dengan demikian pengurusnya dituntut

memiliki pengetahuan dan keterampilan serta sikap yang positif terutama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pemberdayaan masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 pasal 1 point (1) mengatakan bahwa lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat. Tugas lembaga kemasyarakatan menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan adalah lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan. Lembaga kemasyarakatan kelurahan juga merupakan organisasi terendah dalam struktur organisasi sebagai pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat ditingkat kelurahan sehingga dengan demikian pengurusnya dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan serta sikap yang positif terutama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pemberdayaan masyarakat.

Jika kita melihat fakta yang terjadi pada saat ini, keberadaan lembaga kemasyarakatan sangat penting karena mengingat peran lembaga kemasyarakatan yang begitu besar dalam kehidupan sosial masyarakat. Masalah sosial yang terjadi saat ini seperti hal nya tindakan kriminal yang sering terjadi. Seperti adanya warga dari masyarakat serta isu-isu teroris, yang mana saat saat ini begitu meresahkan masyarakat. Masalah sosial lain nya seperti kegiatan bakti sosial, contohnya gotong royong yang jarang sekali dilaksanakan dilingkungan kelurahan, dan juga

masalah umum yang sering terjadi dikelurahan yaitu masih banyak nya ibu-ibu rumah tangga yang tidak bekerja untuk menambah pendapatan keluarga, dan itu tidak terlepas dari peran lembaga kemasyarakatan yang lalai dalam mengawasi masyarakat sekitarnya.

Kelurahan Bukit Batrem sebagai salah satu bentuk pemerintahan yang berstatus desa administratif di Kecamatan Dumai Timur yang terdapat di kota dumai, saat ini memiliki luas wilayah 20,00 Km dan jumlah penduduk tersebar di 15 RT dengan jumlah KK sebesar 2.858 orang. (data 2019)

Dimana menurut peraturan walikota Dumai nomor 43 tahun 2008 lurah mempunyai tugas yaitu Memimpin, melaksanakan, mengkoordinasikan, merumuskan tujuan dan sasaran penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diwilayah kelurahan sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah kelurahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat, pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pembinaan lembaga kemasyarakatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Lurah sebagai pemimpin formal yang berhadapan langsung dengan masyarakat, melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat di lingkungan kelurahan maka dari itu kemampuan seorang lurah dalam memimpin kelurahan sangat penting dan diperlukan oleh masyarakat guna membina lembaga-lembaga kemasyarakatan di kelurahan, menggali dan mengembangkan potensi masyarakat

sehingga dengan demikian diharapkan lembaga kemasyarakatan yang ada dikelurahan dapat mencapai hasil yang diinginkan dengan baik.

Dari sejumlah tugas tersebut, penulis ingin mendalami dan menilai tentang tugas lurah dalam melaksanakan tugas lain yang diperintah oleh camat yaitu melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan ditingkat kelurahan. Agar dapat menumbuhkan kinerja lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dikelurahan dalam pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pelayanan maka semenjak tahun 2016 sampai saat ini tidak kurang 3 lembaga kemasyarakatan yang pernah dibentuk oleh lurah Bukit Batrem yaitu seperti program :

- a. Karang Taruna Purnama. Ini terbentuk berdasarkan Keputusan Lurah Bukit Batrem Nomor 21 Tahun 2016.
- b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Terbentuk berdasarkan Keputusan Lurah Bukit Batrem Nomor 16 Tahun 2016.
- c. Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Terbentuk berdasarkan Keputusan Lurah Bukit Batrem Nomor 23 Tahun 2016

Lembaga kemasyarakatan mempunyai peran penting dalam kehidupan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, menurut Peraturan Menteri Dalam Negerin No. 5 tahun 2007 pasal 1 point (14) mengatakan Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang

usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial. Dan dalam pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 2007 mengatakan bahwa tugas Karang Taruna adalah untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya. Selanjutnya menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 2007 pasal 1 point (11) bahwa Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan, untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK, dan dalam pasal 12 point (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 2007 mengatakan Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Dalam hal ini lembaga kemasyarakatan akan dianggap berlaku apabila norma-normanya dapat membantu pelaksanaan proses pembentukan masyarakat yang sejahtera. Lembaga kemasyarakatan selalu melekat dalam kehidupan masyarakat, tidak dipersoalkan apakah bentuk masyarakat itu masih sederhana ataupun telah maju, setiap masyarakat tentu tidak akan terlepas dengan kompleks kebutuhan atau kepentingan pokok apabila tidak terdapat pengelompokan,

terhimpun menjadi lembaga kemasyarakatan, dan wujud konkrit dari lembaga sosial disebut asosiasi.

Dengan adanya lembaga kemasyarakatan dimaksudkan untuk dapat memelihara dan melestarikan nilai-nilai gotong royong, menumbuh kembangkan peran serta masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna. Pembinaan lembaga masyarakat bertujuan untuk mempercepat masyarakat yang tertib, aman dan sejahtera, selain itu bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar lebih inovatif dan kreatif sehingga dapat berkarya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat.

Pembinaan lembaga kemasyarakatan merupakan sebuah kegiatan yang harus ada, yang mana tujuannya yaitu membimbing atau melatih lembaga kemasyarakatan yang ada dikelurahan, seperti memberikan pelatihan kepada Karang Taruna, PKK, dan LPMK, sehingga tidak terjadi kesalahan, dan dapat lebih berdaya guna bagi masyarakat itu sendiri.

Pentingnya pembinaan dilakukan karena selain pemerintah memerlukan lembaga kemasyarakatan dalam mendukung program pembangunan pemerintah baik dalam bangunan fisik dan non fisik, juga lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada dikelurahan bukan lah lembaga yang betul-betul timbul dari masyarakat kelurahan itu sendiri tetapi justru datang dari luar kelurahan tersebut. Karena itu perlu pembinaan sebagai usaha memelihara dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Santoso (1995: 52)

Pentingnya pembinaan yang dikemukakan oleh Santoso sudah jelas bahwa pembinaan merupakan suatu kegiatan untuk membimbing atau melatih agar sasaran dalam pembinaan dalam hal ini lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada dikelurahan seperti Karang Taruna, LPMK, dan PKK, bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat kelurahan itu sendiri sehingga nantinya dapat menunjang akan pembangunan guna mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Lurah Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai telah melakukan berbagai pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan sebagaimana data tabel berikut ;

Tabel I.1. Program Pembinaan Lurah Terhadap Lembaga Kemasyarakatan Dikelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Tahun 2017

No.	Hari/Tanggal/tempat	Bentuk pembinaan kelurahan	Terlaksana	Tidak Terlaksana
1.	Rabu, 7 Februari 2018 Aula Kantor Lurah Bukit Batrem	Pemberian pengarahan kepada LPMK tentang kesehatan masyarakat dan kebersihan serta gotong royong.	Terlaksana	
2.	Kamis, 21 juni 2018 Aula Kantor Lurah Bukit Batrem	Memberi pengarahan kepada Karang Taruna Untuk membantu keamanan sekitar kelurahan	Terlaksana	

3.	Selasa, 13 November 2018 Kantor Lurah Bukit Batrem	Memeberikan pengarahannya kepada PKK untuk mengajak ibu-ibu bercocok tanam	Terlaksana	
----	---	--	------------	--

Sumber : Kantor Lurah Bukit Batrem, 2018

Dari tabel I.1 diatas terlihat sejumlah bentuk kegiatan pembinaan yang dilakukan lurah Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur yang dimana lebih bersifat umum yaitu pertemuan antar lurah dengan sejumlah lembaga kemasyarakatan seperti Karang Taruna, LPMK, dan PKK untuk mempersiapkan permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat.

Salah satu bentuk program LPMK yang dibentuk lurah bukit batrem adalah Pos Pelayanan Terpadu (kesehatan) yang mempunyai kegiatan untuk melayani masyarakat dalam bidang kesehatan seperti penyuluhan program imunisasi, hiv dan aids serta penyuluhan kebersihan lingkungan agar tercipta lingkungan yang sehat bagi masyarakat.

Selanjutnya bentuk kegiatan yang dilakukan lurah terhadap Karang Taruna adalah memberikan penyuluhan keamanan bagi lingkungan sekitar, “kegiatan ini juga berkerjasama dengan RT dan FKMP Forum Komunikasi Mitra Polisi, setidaknya dari tahun 2013 sampai saat ini tingkat kejahatan sudah cukup berkurang dilingkungan kelurahan” (hasil wawancara lurah bukit batrem).

Sementara kegiatan yang lurah bukit batrem lakukan pada Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yaitu kegiatan rutin yang dilakukan setiap bulan seperti wirid, penyuluhan pembuatan kerajinan tangan seperti menjait pola baju, membuat karangan bunga dan kebun PKK untuk apotik hidup, “karna kegiatan ini

bersifat swadaya saya tetap memanggil instruktur untuk setiap kegiatan yang dilakukan oleh PKK ini agar memperoleh hasil yang maksimal” (hasil wawancara lurah bukit batrem)

Di kelurahan Bukit Batrem sendiri banyak ibu-ibu yang tidak bekerja, mereka hanya menghabiskan waktu untuk dirumah saja. Untuk melihat daftar pekerjaan ibu-ibu yang ada di kelurahan Bukit Batrem dapat dilihat dari Tabel dibawah ini :

Tabel I.2 Daftar pekerjaan Ibu-ibu di Kelurahan Bukit Batrem

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	IRT	1.209 orang
2.	Guru Honor	608 orang
3.	PNS	403 orang
4.	Wirausaha	630 orang
Total		2.567 orang

Sumber : Data Kelurahan Bukit Batrem, 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ibu-ibu yang tidak memiliki pekerjaan sangat banyak. Maka dibentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut, tentu dengan harapan dapat memberdayakan masyarakat agar taraf kehidupan sosial dan ekonomi mereka berjalan dengan baik dari waktu ke waktu. Tapi bila dilihat dari aktifitas masing-masing lembaga tersebut, sesuai dengan tujuan pembentukannya belum menjalankan hal-hal menggembirakan, hal ini dapat dilihat dari beberapa fenomena-fenomena yang penulis jumpai dilapangan yaitu :

1. Terindikasi kurang efektifnya pembinaan lurah terhadap Karang Taruna dan LPMK dalam memberikan pengarahan untuk mengajak masyarakat

menjaga kebersihan lingkungan, keamanan lingkungan dan bergotong royong bersama, akibatnya masih adanya masyarakat yang membuang sampah sembarangan sehingga lingkungan kelurahan menjadi tidak bersih dan kurang sehat bagi masyarakat serta masih adanya kejahatan dilingkungan kelurahan seperti isu penangkapan teroris dan pengedaran narkoba.

2. Terindikasi kurangnya lurah dalam mengkoordinasi program-program pelaksanaan PKK yang tidak punya program kerja. Hal ini dapat dilihat dari data banyaknya ibu-ibu yang tidak bekerja sehingga tidak dapat meningkatkan pendapatan keluarga.

Berangkat dari fenomena-fenomena diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan penulis tuangkan dalam bentuk karya ilmiah yaitu skripsi dengan judul **“Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lurah dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan sebuah masalah yaitu bagaimana hasil pelaksanaan tugas lurah dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dikelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur kota Dumai ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui hasil pelaksanaan tugas lurah dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dikelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur kota Dumai.
 - b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas lurah dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dikelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang ilmu sosial dan ilmu pemerintahan daerah agar lebih bisa berguna diwaktu mendatang dan dapat direalisasikan secara langsung pada pemerintahan daerah dimana tempat penulis tinggal.
 - b. Sebagai bahan bandingan bagi rekan-rekan mahasiswa untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas lurah dilokasi kelurahan yang berbeda.
 - c. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali mengenai tugas lurah dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga lembaga kemasyarakatan agar lebih efektif untuk masyarakat sekitar.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan (Ndraha, 2002: 7)

Brasz (Dalam Syafiie, 2009: 21) mengatakan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara ke dalam maupun keluar terhadap warganya.

Selanjutnya Ilmu Pemerintahan menurut Poelje (Dalam Syafiie, 2009: 21) ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.

2. Konsep Kebijakan Publik

Dunn (2003: 132) kebijakan publik (*public policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Kemudian menurut Indiahono (2009: 18) kebijakan publik dalam kerangka substantif adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi. Kebijakan publik diarahkan untuk memecahkan permasalahan publik dan memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan urusan-urusan publik. Salah satu bentuk kebijakan publik adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2014 tentang kelurahan , yang mana lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud lurah mempunyai tugas dan fungsi:

1. Tugas Lurah
 - a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan.
 - b. Melakukan pemberdayaan masyarakat.
 - c. Melaksanakan pelayanan masyarakat.
 - d. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum.
 - e. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat, dan
 - g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi Lurah

- a. Penyusunan program dan kegiatan Kelurahan.
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
- c. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa lingkup rukun warga.
- d. Pengoordinasian kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- e. Pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang posyandu dan kebersihan.
- f. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang kesejahteraan sosial.
- g. Pelaksanaan penatausahaan Kelurahan.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam peraturan pemerintah diatas terlihat bahwa lurah mempunyai wewenang dalam membina kehidupan masyarakat desa meliputi aspek pendidikan, kesehatan dan kehidupan sosial. Sehingga peran lurah diperlukan dalam hal pembinaan kehidupan masyarakat kelurahan untuk menjadikan keadaan masyarakat menjadi lebih berkonsep organisasi.

Siagian (2003: 37) mendefenisikan organisasi sebagai sekelompok orang yang terikat secara formal dan hirarkis serta bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan tujuannya organisasi dapat dibagi dua, yaitu:

- a. Organisasi publik adalah organisasi yang merupakan bagian dari negara ataupun didirikan oleh negara, yang mana bertujuan untuk melayani masyarakat saja tanpa mengambil keuntungan.
- b. Organisasi privat adalah organisasi yang bertujuan semata-mata mencari keuntungan dan organisasi ini didirikan oleh masyarakat itu sendiri, baik berupa pribadi maupun kelompok.

Dari penjelasan diatas, organisasi publik merupakan organisasi milik pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dan sebagai contoh adalah Kantor lurah Bukit Batrem kota Dumai, sedangkan organisasi privat yang bersifat organisasi yang fokusnya adalah bisnis atau keuntungan. Dengan demikian organisasi publik atau pemerintahan mempunyai suatu orientasi yaitu adalah kepuasan publik dan tujuan negara, dan dalam pelaksanaan kegiatannya organisasi khususnya organisasi publik itu sendiri memerlukan manajemen sebagai pemanfaatan sumber daya organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi yang efisien.

3. Teori Evaluasi

Kata evaluasi berasal dari Bahasa Inggris Evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran, sedangkan menurut istilah Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrument dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan.

Menurut (Purwanto 2002) secara garis besar dapat dikatakan bahwa evaluasi adalah pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Selain dari itu, evaluasi juga

dapat dipandang sebagai proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan.

Menurut William.W.Dunn (2000: 1) Evaluasi adalah sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka, dan pemberian nilai. Kata-kata yang menyatakan untuk menganalisis hasil kebijakan dalam satuan nilainya. Dalam artian yang lebih spesifik lagi evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat hasil kebijakan.

William. W. Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi antara lain :

1. Efektivitas, yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
2. Efisiensi, yaitu seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
3. Kecukupan, yaitu seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah.
4. Perataan, yaitu apakah biaya dan manfaat dibuktikan secara merata kepada kelompok yang berbeda.
5. Responsivitas, yaitu apakah hasil kebijakan memuskan kebutuhan kelompok tertentu.
6. Ketetapan, yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan kelompok tertentu.

Secara umum, istilah Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran pemberi angka dan penilaian.

4. Teori Pembinaan

Menurut Thoha (2002; 7) mengatakan pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik dalam pembinaan ini adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi, atas berbagai kemungkinan berkembang dan perubahan sesuatu.

Menurut Mathis (2002:112), pembinaan adalah proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas.

Selanjutnya Ndraha (2005; 166) mengatakan bahwa istilah pembinaan menunjukkan adanya pengarahan, peraturan dan pengisian. Pembinaan lembaga kemasyarakatan berarti usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam rangka penataan kembali agar pranata atau lembaga kemasyarakatan, pengarahan tingkah laku masyarakat dan pengisian mental anggota masyarakat dengan nilai-nilai budaya nasional.

Untuk terlaksananya suatu pembinaan menurut Ndraha (2005; 168) harus melalui :

1. Pendidikan.
2. Latihan (penataan, upreading, kursus dan sebagainya).
3. Lokakarya.
4. Bimbingan lapangan.

5. Penerbangan.
6. Pertemuan, diskusi, dan musyawarah.
7. Pers, radio, dan televisi.
8. Literatur dan sebagainya.
9. Instruksi-instruksi dan teladan.

5. Konsep Tugas

Menurut Moekijat (1998; 11) tugas adalah suatu bagian atau suatu unsur atau suatu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari suatu unsur element atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap. Sementara Stone Dama Moekijat (1998; 10) mengemukakan bahwa tugas adalah suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam sebuah organisasi yaitu menurut John dan Mary Miner dalam Moekijat (1998; 10) menyatakan bahwa tugas diatas, adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan khusus.

Berdasarkan definisi tugas diatas, dapat disimpulkan bahwa tugas adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

6. Konsep Efektifitas

Kata efektifitas berasal dari bahasa inggris yaitu *Effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer

mendefinisikan efektifitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Efektifitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H.Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat.S (1994; 16) yang menyatakan bahwa “Efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Sedangkan menurut Masruri (2014 : 11) mengatakan bahwa efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan, ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.”

Selanjutnya Martoyo (2002 ; 4) mengemukakan bahwa efektifitas adalah suatu kondisi atau keadaan dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai dengan kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang di inginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.

Dari beberapa pendapat diatas mengenai efektifitas, dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat Moh Syarif (2015 : 1) efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan

waktu) telah tercapai, atau makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.

7. Konsep Efisiensi

Efisiensi atau penghematan yaitu dimana apabila dilakukan semuanya bisa menjadi lebih menguntungkan. Efisiensi merupakan suatu ukuran tentang seberapa efisien suatu proses mengkonsumsi masukan dan seberapa produktif proses menghasilkan keluaran. Efisiensi merupakan rasio antara keluaran dengan masukan suatu proses, dengan fokus perhatian pada konsumsi masukan. Produktifitas merupakan rasio antara masukan dengan keluaran, dengan fokus dengan fokus perhatian pada keluaran yang dihasilkan oleh proses.

Ada tiga kegunaan mengukur efisiensi yaitu sebagai berikut :

- a. Sebagai tolak ukur untuk memperoleh efisiensi relatif, mempermudah membandingkan antara unit ekonomi satu dengan lainnya.
- b. Apabila terdapat variasi tingkat efisiensi dari beberapa unit ekonomi yang ada maka dapat dilakukan penelitian untuk menjawab faktor-faktor apa yang menentukan perbedaan tingkat efisiensi.
- c. Informasi mengenai efisiensi memiliki implikasi kebijakan karena manajer dapat menentukan kebijakan perusahaan secara tepat.

Efisiensi teknis sebenarnya mencerminkan seberapa tinggi tingkat teknologi dalam proses produksi.

8. Konsep Responsivitas

Menurut Zeitzmal Para Suraman dan Berry dalam buku *Delivering QualityService* (1990: 59) Mengemukakan bahwa responsivitas merupakan salah

satu instrument yang cukup penting dalam mengukur kinerja suatu organisasi, termasuk didalamnya adalah organisasi publik.

Menurut Agus Dwiyanoro (2006; 62) responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur daya tanggap birokrasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan pengguna jasa.

9. Konsep Job Ananalysis

Analisis pekerjaan merupakan terjemahan dari *Job Analysis*, yang terdiri dari kata *Job* dan *Analysis*. *Job* yang memiliki arti pekerjaan, jabatan, tugas dan kegiatan pekerjaan. Sedangkan *Analysis* berarti memisah-misahkan pekerjaan kedalam bagian atau unsur-unsur yang disebut tugas.

Analisis pekerjaan adalah cara sistematis mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang isi pekerjaan dan kebutuhan tenaga manusia, serta konteks dimana pekerjaan dilaksanakan. Adapun definisi atau pengertian menurut para ahli mengenai analisis pekerjaan, menurut Bedjo Siswanto (2003; 37) adalah *“suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai unsur-unsur dan tugas-tugas yang terkandung dalam jabatan”*. Selain itu, menurut Gibson, Ivancevich, dan Donnelly (1993; 38), *“Analisis jabatan adalah proses pengambilan keputusan yang menerjemahkan faktor tugas, manusia, dan teknologi menjadi sebuah desain pekerjaan”*.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan analisis pekerjaan adalah kegiatan mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara menghimpun serta mengolah data dan kemudian menyajikan hasil berupa informasi secara sistematis, tepat, dan jelas untuk keperluan pengelolaan pekerjaan, tenaga kerja, dan teknologi dalam organisasi.

Setiap pegawai harus dapat memperhatikan aspek penting yang ada dalam pelaksanaan jabatan atau tugasnya yaitu apa yang benar benar harus dikerjakan sebagai suatu kewajiban dan apa yang harus dipertanggung jawabkan oleh pegawai itu kepada atasannya. Maka dari itu, menurut Ardana, Mujiati, dan Utama (2012; 33), perlunya analisis pekerjaan mencakup beberapa prinsip sebagai berikut :

- a. Analisis pekerjaan harus memberikan semua fakta penting yang ada hubungan nya dengan pekerjaan.
- b. Analisis pekerjaan harus dapat memberikan fakta yang diperlukan untuk bermacam macam tujuan.
- c. Analisis pekerjaan harus sering ditinjau, bila perlu diperbaiki.
- d. Analisis pekerjaan harus dapat menunjukan unsur-unsur pekerjaan yang paling penting diantara beberapa unsur pekerjaan dalam setiap pekerjaan.
- e. Analisis pekerjaan harus dapat memberikan informasi yang teliti dan dapat dipercaya.

Berdasarkan prinsip diatas, maka dapat dihubungkan dengan empat macam informasi pekerjaan yang dikemukakan oleh Dale Yoder dalam Moekijat (1998; 61-62), antara lain apa yang dilakukan, syarat-syarat perseorangan, tanggung

jawab pekerjaan, dan kondisi kerja. Selain itu, menurut Sedarmayanti (2009; 145) menjelaskan pula bahwa informasi karakteristik pekerjaan yang dapat membedakan antara pekerjaan yang satu dengan yang lainnya antara lain aktifitas dan tingkah laku pekerjaan, interaksi dengan pegawai lainnya, standart kinerja, pengaruh terhadap keuangan dan penganggaran, mesin dan peralatan yang digunakan serta kondisi pekerjaan.

10. Konsep Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan diartikan sebagai suatu jaringan proses-proses hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia yang berfungsi untuk memelihara hubungan-hubungan tersebut serta pola-pola sesuai dengan kepentingan manusia dan kelompoknya (Soekanto, 2000; 219)

Menurut Soekanto (2000; 230) menjelaskan beberapa ciri umum lembaga pemasyarakatan sebagai berikut:

- a. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktifitas-aktifitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya.
- b. Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan.
- c. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu.
- d. Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan.
- e. Lembaga biasanya juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan.
- f. Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tradisi tertulis atau tidak tertulis.

Selanjutnya adapun fungsi lembaga kemasyarakatan menurut Soekanto (2000; 245) menjelaskan bahwa :

1. Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap didalam menghadapi masalah masalah dalam masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan pokoknya.
2. Menjaga kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.
3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial artinya sistem pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

11. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini lebih luas hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut, yang pemikirnya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa lalu.

Lahirnya konsep pemberdayaan sebagai antitesa terhadap model pembangunan yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut :

- a. Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan kekuasaan faktor produksi.

- b. Pemusataan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran.
- c. Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan sistem ideologi yang manipulatif untuk memperkuat legitimasi.
- d. Pelaksanaan sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan ideologi secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya.

Dalam konsep pemberdayaan menurut Prijono dan Pranarka (1996; 89) manusia adalah subjek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotifasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya.

Menurut Sumadiningrat (1999; 79) bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

12. Konsep Kecamatan

Menurut pasal 66 UU No.32 tahun 2004, kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten dan daerah kota yang dipimpin oleh kepala camat yang diangkat

oleh bupati/walikota atas usul dari sekretaris daerah kabupaten/kota dan pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat. Sebagai perangkat daerah organisasi kecamatan yang dipimpin oleh camat untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan bupati dan tugas-tugas umum pemerintahan. Dalam melaksanakan otonomi daerah organisasi kecamatan menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat. Hal ini disebabkan kecamatan menjadi penyambung kebijakan pemerintah daerah dan masyarakat luas, fungsi-fungsi koordinatif dan pembinaan pada level desa dan kelurahan menjadi tanggung jawab kecamatan. (Poernomo, 2014; 28)

Oleh karna itu kecamatan menerima sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Disamping itu kecamatan adalah sebagai koordinator dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum. Ada 2 tugas utama kecamatan yaitu sebagai pelayan masyarakat dan melakukan pembinaan wilayah. Tugas pembinaan wilayah dilakukan dengan melakukan koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah diwilayah kecamatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan atau instansi pemerintah lainnya diwilayah kecamatan, sedangkan dari segi pelayanan masyarakat, pihak masyarakat menjalankan sebagian wewenang yang diberikan oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu pengembangan lembaga kecamatan menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan.

Kebijakan otonomi daerah merupakan suatu etikat baik pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kecamatan sebagai unsur perangkat daerah memiliki peran fital dalam keberhasilan otonomi daerah, kecamatan dilihat dari sistem pemerintahan indonesia, merupakan ujung tombak dari pemerintahan daerah yang langsung berhadapan dengan masyarakat luas. Citra birokrasi pemerintahan secara keseluruhan akan banyak ditentukan oleh kinerja organisasi tersebut. Masyarakat perkotaan yang peradabannya sudah cukup maju, mempunyai kompleksitas permasalahan lebih tinggi dibandingkan pada masyarakat tradisional sehingga diperlukan aparatur pelayanan yang profesional (Poernomo, 2004; 30)

A. Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil dari berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas, berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah sebagai berikut ;

Tabel II.1. Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5

1.	Ine Antika 2016	Evaluasi Tugas Lurah Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Lembaga Kemasyarakatan dikelurahan Sungai Pagar	Sama-sama menggunakan variabel evaluasi dalam menilai tugas lurah	Lokasi dan Penelitian ine antika dikelurahan Sungai Pagar Sedangkan penelitian saya di kelurahan Bukit Batrem Kota Dumai.
2.	Boby Indra 2016	Evaluasi pelaksanaan fungsi dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan dikelurahan Kampas Jaya Indra Giri Hilir	Sama-sama membina lembaga kemasyarakatan	Penelitian Boby Indra lebih menekankan kepada fungsi pembinaan lembaga kemasyarakatan, sedangkan penelitian saya lebih menekankan kepada tugas lurah dalam melakukan pembinaan.
3.	M. Zaki 2018	Evaluasi pelaksanaan tugas lurah sebagai pembina lembaga kemasyarakatan LPM, RT, RW	Persamaan pada penelitian kami yaitu terletak pada tugas lurahnya dalam membina lembaga kemasyaakaan.	Penarikan sampel pada penelitian M. Zaki ia menggunakan 2 teknik yaitu, teknik sensus, dan teknik random sampling, sedangkan pada penelitian saya, saya menggunakan 3 teknik penarikan sampel yaitu teknik sensus, random sampling, dan purposive sampling
1	2	3	4	5
4.	M. Azman Hidayat 2018	Evaluasi pembinaan oleh lurah terhadap lembaga	Persamaan penelitian kami yaitu terletak pada penarikan sample	Indikator penilaian yang digunakan oleh M. Azman Hidayat

		kemasyarakatan Dikelurahan Rimba Sekampung kecamatan Bengkalis	nya menggunakan Teknik yaitu sensus, purposive sampling, dan random sampling	yaitu melakukan Penyuluhan, memberikan pengarahan, dan memerikan bimbingan, sedangkan pada penelitian saya, saya menggunakan indikator dari Evaluasi.
5.	Rustam 2016	Evaluasi pelaksanaan tugas camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kepenghuluan dikecamatan Tanah Putih	Persamaan penelitian kami yaitu sama-sama menggunakan tipe penelitian descriptif.	Pada penelitian Rustam disini objek yang diteliti adalah perangkat kepenghuluan, sedangkan saya yaitu LPM, PKK, dan Karang Taruna.

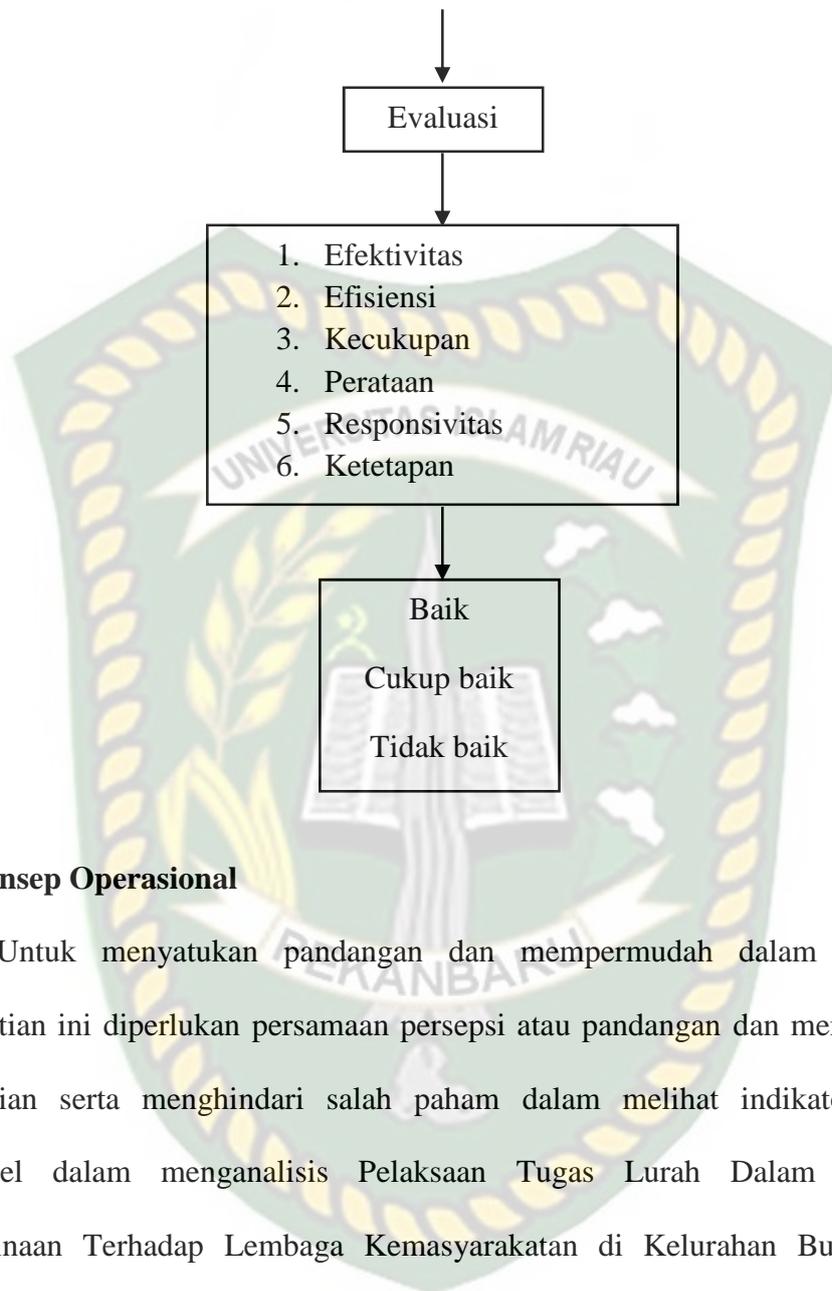
Sumber : perpustakaan UIR, 2018

B. Kerangka pemikiran

Adapun kerangka pikiran sebagai konsep untuk menganalisis variabel dalam penelitian ini, yang digambarkan dengan diagram sebagai berikut :

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran Tentang Evaluasi Tugas Lurah Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai





C. Konsep Operasional

Untuk menyatukan pandangan dan mempermudah dalam melakukan penelitian ini diperlukan persamaan persepsi atau pandangan dan mempermudah penilaian serta menghindari salah paham dalam melihat indikator-indikator variabel dalam menganalisis Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Melakulan Pembinaan Terhadap Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai. Untuk itu dibutuhkan standar operasional sebagai indikator dan variabel-variabel yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis mencakup pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi-solusi atas permasalahan yang ditemukan.

2. Efektivitas berkenaan apakah pada alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.
3. Efisiensi adalah sumber daya (resource) kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
4. Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah di rasakan mencukupi dalam berbagai hal.
5. Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh oleh sasaran.
6. Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan respon dari suatu aktivitas.
7. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.
8. Tugas adalah suatu bagian atau unsur atau suatu komponen dari suatu jabatan. Yang dimaksud dengan tugas disini adalah lurah dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dikelurahan Bukit Batrem kota Dumai.

D. Operasional Variabel

Operasional variabel adalah cara memberikan arti atau mendeskripsikan (penggambaran) dari sudut suatu variabel kegiatan atau memberikan suatu

operasional (pekerjaan) yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.

Sedangkan variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai.

Tabel II.2. Operasional variabel penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Ukuran
1	2	3	4	5
Kebijakan publik (<i>public policy</i>) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah Dunn (2003: 132)	Evaluasi (William. W.Dunn 2000 ; 1)	1. Efektivitas	1. Penetapan tujuan program 2. Proses pelaksanaan 3. Hasil pelaksanaan	Nominal
		2. Efesiensi	1. Ketepatan sasaran 2. Ketersediaan dan 3. Penegeluaran dana	Nominal
		3. Kecukupan	1. Kecukupan sarana dan prasarana 2. Kesiapan pelaksanaan program	Nominal
		4. Perataan	1. Pemberian pelayanan 2. Pelaksanaan pelayanan	Nominal
		5. Responsivitas	1. Ketepatan sasaran	Nominal
1	2	3	4	5

		6. Ketepatan	2. Koordinasi pelaksanaan 1. Ketetapan sasaran 2. Koordinasi pelaksanaan	Nominal
--	--	--------------	--	---------

E. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Lembaga Kemasyarakatan di Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, maka dibuatlah pengukuran variabel :

Baik : Apabila seluruh indikator telah terlaksana dengan baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 66-100%

Cukup Baik : Apabila hanya satu indikator yang terlaksana, dengan hasil rekapitulasi responden antara 34-65%

Kurang Baik : Apabila tidak ada indikator yang terlaksana, dengan hasil rekapitulasi responden antara 0-33%

Adapun ukuran yang diberikan untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Efektifitas

Baik : Apabila seluruh indikator telah terlaksana dengan baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 66-100%

Cukup Baik : Apabila hanya satu indikator yang terlaksana, dengan hasil rekapitulasi responden antara 34-65%

Kurang Baik : Apabila tidak ada indikator yang terlaksana, dengan hasil rekapitulasi responden antara 0-33%

2. Efisiensi

Baik : Apabila seluruh indikator telah terlaksana dengan baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 66-100%

Cukup Baik : Apabila hanya satu indikator yang terlaksana, dengan hasil rekapitulasi responden antara 34-65%

Kurang Baik : Apabila tidak ada indikator yang terlaksana, dengan hasil rekapitulasi responden antara 0-33%

3. Kecukupan

Baik : Apabila seluruh indikator telah terlaksana dengan baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 66-100%

Cukup Baik : Apabila hanya satu indikator yang terlaksana, dengan hasil rekapitulasi responden antara 34-65%

Kurang Baik : Apabila tidak ada indikator yang terlaksana, dengan hasil rekapitulasi responden antara 0-33%

4. Perataan

Baik : Apabila seluruh indikator telah terlaksana dengan baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 66-100%

Cukup Baik : Apabila hanya satu indikator yang terlaksana, dengan hasil rekapitulasi responden antara 34-65%

Kurang Baik : Apabila tidak ada indikator yang terlaksana, dengan hasil rekapitulasi responden antara 0-33%

5. Responsivitas

Baik : Apabila seluruh indikator telah terlaksana dengan baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 66-100%

Cukup Baik : Apabila hanya satu indikator yang terlaksana, dengan hasil rekapitulasi responden antara 34-65%

Kurang Baik : Apabila tidak ada indikator yang terlaksana, dengan hasil rekapitulasi responden antara 0-33%

6. Ketepatan

Baik : Apabila seluruh indikator telah terlaksana dengan baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 66-100%

Cukup Baik : Apabila hanya satu indikator yang terlaksana, dengan hasil rekapitulasi responden antara 34-65%

Kurang Baik : Apabila tidak ada indikator yang terlaksana, dengan hasil rekapitulasi responden antara 0-33%

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif, dimana penulis akan menggambarkan kondisi secara objektif yang ditemui dilapangan berdasarkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan.

Penggunaan tipe penelitian ini mengukur secara cermat dengan menggunakan analisis kuantitatif melalui penggambaran sistematis dan pengumpulan fakta-fakta yang ada. Penelitian ini dibatasi dengan data yang terkumpul dari sampel yang mewakili populasi.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian ini yaitu kantor lurah Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai. Dengan alasan utama pemilihan lokasi ini ya

itu di kantor ini ditemukannya persoalan yang berkaitan dengan kurangnya pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dikelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur. Hal ini terlihat bahwasannya lembaga-lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Bukit Batrem seperti lembaga karang taruna sejak dibentuk belum menunjukkan aktivitas-aktivitas yang jelas sesuai dengan tugas-tugasnya.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi dapat dikatakan sebagai totalitas atau keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia dan benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala nilai test atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu (Hadari, 2005; 141). Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Lurah, Pegawai kelurahan bagian pemberdayaan, anggota LPMK, anggota PKK, anggota Karang Taruna.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2005; 91). Secara sederhana sampel dapat diartikan sebagian dari populasi, sampel adalah sebagian individu yang diselidiki itu disebut sampel (contoh). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.1. Sampel Dan Populasi

No.	Populasi	Jumlah Populasi	Sampel	%
1.	Lurah	1	1	100%
2.	Pegawai Kelurahan	6	6	100%
3.	Lembaga Kemasyarakatan :			
	a. Pengurus LPMK	8	4	50%
	b. Pengurus Karang Taruna	14	5	36%
	c. Pengurus PKK	10	6	60%
	Jumlah	39	22	

Sumber : kantor lurah Bukit Batrem, 2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Adapun proses penarikan sample dalam penelitian ini bertitik tolak pada jumlah populasi yang ada di Kantor Lurah Bukit Batrem. Sehingga teknik

penarikan sampel yang digunakan untuk lurah adalah teknik sensus, sedangkan untuk pegawai kelurahan yaitu menggunakan purposive sampling, dan untuk lembaga kemasyarakatan adalah teknik random sampling.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang merupakan sumber utama penelitian ini, yakni data yang diperoleh langsung dari hasil tanggapan responden dan wawancara yang telah ditetapkan dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas lurah Bukit Batrem.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak pertama, melalui dokumen, monografi, laporan-laporan, literatur-literatur dan lampiran data yang lain dapat mendukung dan menjelaskan permasalahan dalam penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dan informasi lengkap maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data terhadap fokus penelitian. Dalam hal ini pengambilan data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut ;

1. Kuisisioner

Adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan sejumlah pertanyaan kepada responden mengenai pelaksanaan tugas lurah dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di kelurahan Bukit Batrem kecamatan Dumai Timur kota Dumai. Kuisisioner ditujukan

kepada pegawai kantor lurah Bukit Batrem dan anggota lembaga kemasyarakatan. Penyebaran kuisioner yang penulis lakukan diantaranya dengan mendatangi pegawai dan anggota lembaga kemasyarakatan di kantor lurah Bukit Batrem

2. Observasi

Merupakan tehnik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung oleh penulis. Alasan penulis menggunakan tehnik observasi adalah dengan pengamatan tehnik tersebut guna memperoleh data dari kantor Lurah Bukit Batrem.

3. Dokumentasi

Yaitu tehnik pengumpulan data dengan kegiatan mengumpulkan dan menyusun data pada penelitian ini dalam bentuk foto, gambar dan lain-lain yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian. Foto-foto tersebut digunakan sebagai informasi tambahan yang menunjukkan keadaan yang sebenarnya.

4. Wawancara

Yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada Lurah mengenai pelaksanaan tugas lurah dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan. Wawancara ditujukan kepada Lurah Bukit Batrem.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan tehnik penganalisaan secara deskriptif. Setelah data dikumpulkan secara lengkap dan menyeluruh, maka data tersebut dikelompokkan dan disesuaikan dengan jenis data yang diperoleh, selanjutnya akan

dibahas dan dianalisa dalam dua bentuk. Data yang bersifat kualitatif akan diuraikan dengan lengkap dan rinci dalam bentuk kalimat, sedangkan data yang bersifat kuantitatif akan ditabulasikan dalam bentuk tabel, kemudian barulah membandingkan dengan teori dan pendapat para ahli untuk kemudian diambil kesimpulan dengan induktif.

H. Jadwal dan Waktu Penelitian

Adapun jadwal kegiatan penelitian mengenai Evaluasi Tugas Lurah dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai.

Tabel III.2. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Tugas Lurah dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai

No.	Jenis Kegiatan	Tahun 2018-2019 / Bulan / Minggu																											
		Juni				Juli				agustus				September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan UP	■	■	■	■																								
2.	Seminar UP									■																			
3.	Perbaikan UP										■																		
4.	Revisi Kuisisioner																												
5.	Rekomendasi Survey																												
6.	Survey Lapangan																												
7.	Analisis Data																												
8.	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																												
9.	Konsultasi Revisi Skripsi																												
10.	Ujian Konfer-hensif Skripsi																												
11.	Revisi Skripsi																												
12.	Penggandaan Skripsi																												

Sumber : Modifikasi Penulis, 2018

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis

Kelurahan Bukit Batrem adalah sebuah perkampungan yang termasuk dalam kawasan Kelurahan Jayamukti kecamatan Dumai Timur, atas kebijakan Pemerintah Kota Dumai dalam rangka pengembangan dan pemekaran wilayah, Sesuai Perda Kota Dumai Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kelurahan, maka kawasan Bukit Batrem menjadi Kelurahan Bukit Batrem.

Luas wilayah Kelurahan Bukit Batrem mencapai 20.00 Km dengan batas wilayah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Jaya Mukti
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Bagan Besar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tg. Palas
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Bumi Ayu

Dalam penyelenggaraan Pemerintah, Kelurahan Bukit Batrem sebagai wujud kehadiran Pemerintahan Daerah dalam mengayomi dan melayani masyarakat kota Dumai khususnya kawasan Bukit Batrem, saat ini Kelurahan Bukit Batrem memiliki 15 RT (Rukun Tetangga).

B. Keadaan Penduduk

1. Jumlah penduduk

Dibawah ini akan dipaparkan jumlah penduduk yang ada dikelurahan Bukit Batrem kecamatan Dumai Timur yang dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dikelurahan Bukit Batrem

No.	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	6,017	54%
2.	Perempuan	5.099	46%
Jumlah		11.116	100%

Sumber : Kantor lurah Bukit Batrem 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang ada dikelurahan Bukit Batrem terdapat penduduk jenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk jenis kelamin perempuan, yaitu penduduk jenis kelamin perempuan sebanyak 5.099 jiwa sedangkan jenis kelamin laki-laki 6.017 jiwa.

2. Mata pencaharian

Tabel IV.2. Jenis dan Jumlah Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Bukit Batrem

No.	Mata pencaharian	Jumlah
1.	Pegawai negeri sipil	491 jiwa
2.	Tentara negara indonesia	226 jiwa
3.	Swasta	691 jiwa
4.	Wiraswasta	903 jiwa
5.	Petani	696 jiwa
6.	Pertukangan	409 jiwa
7.	Buruh tani	611 jiwa
8.	Nelayan	993 jiwa
9.	Pemulung	201 jiwa
10.	Jasa	571 jiwa
Jumlah		5.592 jiwa

Sumber : kantor lurah Bukit Batrem 2019

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah mata pencaharian yang lebih dominan adalah Nelayan yang berjumlah 993 jiwa, dikarenakan kota Dumai adalah kota yang dekat dengan lautan, kemudian disusul oleh wiraswasta yang berjumlah 903 jiwa.

3. Agama dan Kepercayaan

Sesuai dengan filsafah negara, pelayanan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa senantiasa di kembangkan dan ditingkatkan untuk membina kehidupan masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan membangun sarana dan prasarana ibadah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penduduk kelurahan Bukit Batrem sebagian besar memeluk agama Islam, dan sebagian memeluk agama Budha dan Kristen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel IV.3. Jumlah Penduduk Menurut Penganut Agama Yang Ada Dikelurahan Bukit Batrem

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	6.856 jiwa
2.	Kristen protestan	1.802 jiwa
3.	Kristen katolik	1005 jiwa
4.	Budha	894 jiwa
5.	Hindu	559 jiwa
Jumlah		11.116 jiwa

Sumber : kantor lurah Bukit Batrem, 2019

4. Tingkat pendidikan

Dalam pemerataan pembangunan pendidikan, dan untuk meningkatkan tingkat pemahaman masyarakat dalam menyikapi kondisi perkembangan

informasi yang kian meningkat, masyarakat kelurahan memiliki tingkat pendidikan heterogen. Hal ini menyebabkan tingkat analisa masyarakat terhadap sistem pemerintahan kecamatan juga berbeda. Oleh sebab itu dibawah ini akan dipaparkan tingkat pendidikan masyarakat kelurahan bukit batrem yang akan dituangkan pada tabel dibawah ini ;

Tabel IV.4. Tingkat Pendidikan Masyarakat Dikelurahan Bukit Batrem

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah
1.	SD	1.135 orang
2.	SLTP	906 orang
3.	SLTA	2.991 orang
4.	Akademi (D1-D3)	809 orang
5.	Sarjana (S1-S3)	785 orang
6.	Tidak sekolah	907 orang
Jumlah		7.533 orang

Sumber : kantor lurah bukit batrem, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jawaban responden yang dilihat dari tanggapan responden dinilai yang memiliki kemampuan pemahaman yang baik, hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan responden sebagian besar adalah tamatan SLTA yang berjumlah 2.991 jiwa.

C. Struktur Organisasi Kelurahan Bukit Batrem

Adapun susunan organisasi pemerintah kelurahan bukit batrem berikut tugas dan fungsinya terdiri dari :

- a. Lurah.
- b. Sekretaris lurah.
- c. Seksi pemberdayaan masyarakat.
- d. Seksi ketentraman dan ketertiban.

- e. Seksi pemerintahan.
- f. Kelompok jabatan fungsional.

1. Lurah

Lurah mempunyai tugas pokok membantu camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut lurah mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
- b. Pemberdayaan masyarakat.
- c. Pelayanan masyarakat.
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.
- f. Peminaan lembaga kemasyarakatan.

2. Sekretaris lurah

Sekretaris lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dibidang kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintahan kelurahan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, sekretaris lurah mempunyai fungsi ;

- a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan.
- b. Melakukan pengelolaan administrasi program.
- c. Merencanakan susunan kebutuhan barang dan alat kelengkapan kantor.

- d. Mempersiapkan pengawasan terhadap disiplin pegawai, budaya bersih, budaya kerja, dan budaya tertib.
- e. Penyusunan rencana, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan serta penyusunan laporan.
- f. Penyelenggaraan koordinasi dan penendalian atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh lurah.
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas.
- h. Pelaksanaan tata usaha umum, kepegawaian dan perlengkapan rumah tangga.
- i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku.
- j. Pengelolaan urusan keuangan dan administrasi kelurahan.
- k. Pelaksanaan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas seksi dan kelompok jabatan fungsional.
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh lurah.

3. Seksi pemerintahan

Seksi pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala kelurahan dibidang pemerintahan, seksi pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan.
- b. Membuat tugas-tugas yang berhubungan dengan pemerintahan.
- c. Melaksanakan tugas-tugas pembantuan dan pengawasan pemilihan umum.

- d. Mempersiapkan ketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian sosial.
- e. Menyelenggarakan pendaftaran dan pencatatan penduduk, mengikuti, mengumpulkan data pengembangan dan kegiatan kelurahan.
- f. Menyelenggarakan kerjasama antar kelurahan, mengumpulkan data tentang kegiatan umum.
- g. Menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrarian.
- i. Pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

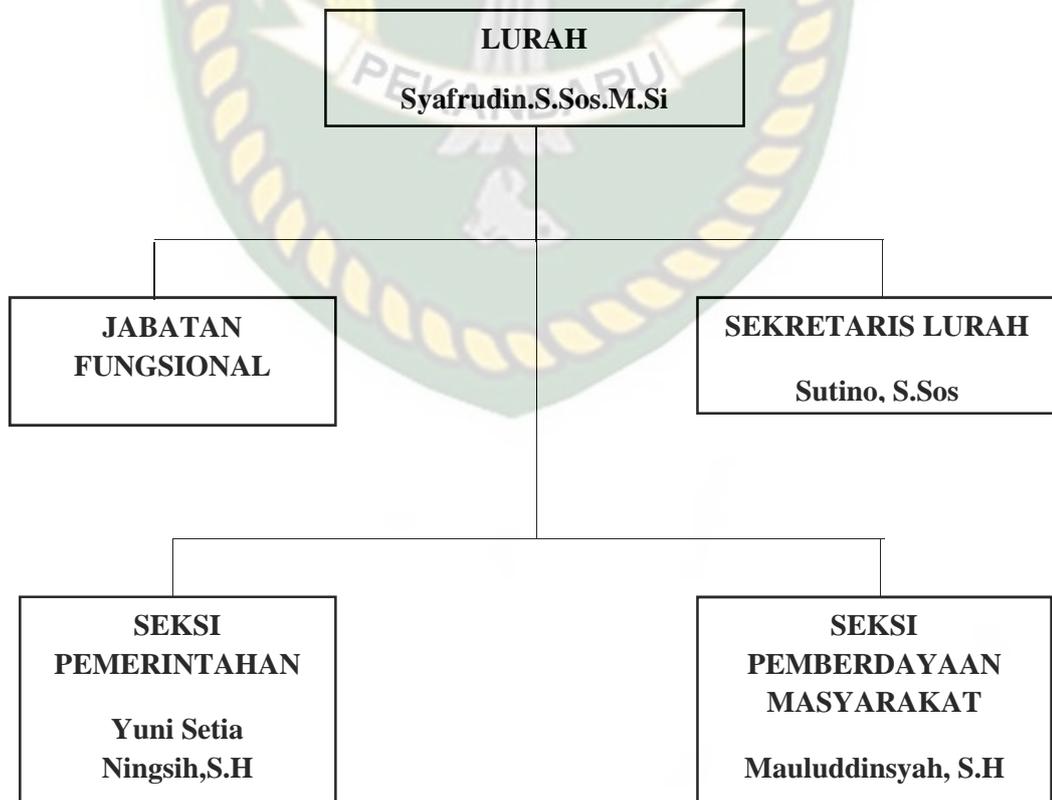
4. Seksi pemberdayaan masyarakat

Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala kelurahan dibidang pemberdayaan, seksi pemberdayaan yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja kelurahan.
- b. Memberi petunjuk, arahan, dan mendistribusikan tugas bawahan.
- c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis program kegiatan kelurahan sesuai dengan bidang dan tugas.
- d. Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang dan tugas.

- e. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat.
- f. Melakukan penyiapan bahan penilaian pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- g. Melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat.
- h. Melakukan fasilitas pembinaan terhadap usaha-usaha masyarakat di bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
- i. Melakukan fasilitas pembinaan dan pemberian bantuan PKK, LPMK, dan Karang Taruna.
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh lurah.

Gambar IV.1 Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Bukit Batrem



Sumber : kantor lurah bukit batrem, 2019

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat judul Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, peneliti mengambil data yang dibutuhkan dalam hal mengambil kesimpulan. Adapun data dan hasil responden yang dilakukan dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran dari responden dalam penelitian ini, akan dipaparkan sebagai berikut :

A. Identitas Responden

Berkaitan dengan hal tersebut maka yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah kelurahan bukit batrem, dari hasil pengamatan peneliti dalam pelaksanaan penelitian terhadap keseluruhan responden yang digunakan sebagai sampel maka pada bab ini disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas responden dan hasil jawaban yang diperoleh dari hasil penyebaran kuisioner serta wawancara dan observasi yang akan dijelaskan pada bab ini.

1. Tingkat usia

Secara teoritis faktor usia akan mempengaruhi seseorang dalam bekerja. Disisi lain tingkat usia juga akan mempengaruhi seseorang dalam melakukan setiap aktivitas dalam kehidupannya, usia seseorang cenderung mempengaruhi

pola pikir dalam bekerja, adapun tingkat usia responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel V.1. Identitas Responden Menurut Tingkat Usia

No.	Tingkat Usia	Frekuensi	Persentase
1.	20	0	0%
2.	21-29	5	23%
3.	30-39	10	45%
4.	40	7	32%
	Jumlah	22	100%

Sumber ; kantor lurah Bukit Batrem, 2019

Dari tabel V.1 dapat diketahui tingkat umur responden yang merupakan pegawai Kelurahan Bukit Batrem dan anggota Lembaga Kemasyarakatan yaitu berusia dibawah 20 tahun tidak ada, kemudian 21-29 tahun adalah sebanyak 5 orang, kemudian 30-39 tahun sebanyak 10 orang, dan yang terakhir yaitu 40 tahun keatas sebanyak 4 orang.

2. Jenis kelamin

Jumlah responden menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tabel V.2. Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Laki-laki	10	45%
2.	Perempuan	12	56%
	Jumlah	22	100%

Sumber : kantor lurah Bukit Batrem, 2019

Dari tabel V.2 dapat diketahui tingkat umur responden yang merupakan pegawai Kelurahan Bukit Batrem dan anggota Lembaga Kemasyarakatan yaitu sebanyak 10 orang berjenis kelamin laki-laki, dan sebanyak 12 orang yaitu berjenis kelamin perempuan.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan pada dasarnya berkaitan erat dengan produktivitas pekerjaan. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin bagus pola berfikirnya. Tingkat pendidikan seseorang pada umumnya menentukan sikap dan tindakan seseorang dalam melakukan pekerjaan

Tabel V.3. Identitas Responden Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	SD	0	0%
2.	SLTP	0	0%
3.	SLTA	13	59%
4.	D3	2	9%
5.	Sarjana (S1)	6	27%
6.	Sarjana (S2)	1	5%
Jumlah		22	100%

Sumber ; kantor lurah Bukit Batrem, 2019

Pada tabel V.3 diatas dapat dilihat bahwa dari 22 responden, terdapat sebanyak 0 orang responden (0%) yang berpendidikan Sekolah Dasar (SD), kemudian sebanyak 0 orang responden (0%) berpendidikan SLTP, selanjutnya sebanyak 13 orang responden (59%) berpendidikan SLTA, kemudian 2 orang responden (9%) berpendidikan D3, sebanyak 6 orang responden (27%)

berpendidikan Sarjana (S1), dan sebanyak 1 orang responden (5%) berpendidikan Sarjana (S2).

B. Hasil dan Pembahasan

Menurut Dunn (2003:610) kriteria evaluasi adalah efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, ketepatan. Maka dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan pelaksanaan tugas lurah dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dikelurahan bukit batrem kecamatan dumai timur kota dumai (studi kasus dikecamatan Dumai Timur) adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas

Efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna, efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya yang telah dicapai. Dengan demikian apabila pencapaian tujuan-tujuan dari pada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya.

Berikut ini adalah tanggapan responden mengenai efektivitas program kerja pada tugas lurah dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan :

Tabel V.4. Tanggapan Responden (pegawai) Terhadap Efektivitas Program Yang Dilakukan Oleh Lurah Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Lembaga Kemasyarakatan Dikelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai

No.	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Kurang baik	
1.	Penetapan tujuan proses	3	3	0	6

2.	Proses pelaksanaan	5	1	0	6
3.	Hasil pelaksanaan	5	0	1	6
	Jumlah	13	4	1	18
	Rata-rata	4	1	1	6
	Persentase	31%	54%	15%	100%

Sumber : kantor lurah Bukit Batrem, 2019

Berdasarkan tabel V.4 diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden yang menyatakan baik pada penetapan tujuan proses sebanyak 3 orang, adapun alasan responden (pegawai) yaitu lurah dinilai sudah baik dalam menetapkan tujuan-tujuan proses. Selanjutnya yang menyatakan cukup baik sebanyak 3 orang, adapun alasannya yaitu lurah dinilai belum sepenuhnya menetapkan tujuan proses. Sedangkan responden yang memilih kurang baik sebanyak 0 orang.

Pada item yang kedua dapat diketahui bahwa tanggapan responden yang menyatakan baik pada proses pelaksanaan yaitu sebanyak 5 orang, dengan alasan responden yaitu lurah dinilai sudah baik dalam melaksanakan program yang telah dilaksanakan. Sedangkan responden yang menyatakan cukup baik sebanyak 1 orang, alasan responden yaitu lurah dinilai cukup baik dalam menjalankan program-program dilingkungan kelurahan. Sedangkan yang menyatakan kurang baik sebanyak 0 orang.

Dan pada item yang ketiga dapat diketahui tanggapan responden yang menyatakan baik pada hasil pelaksanaan yaitu sebanyak 5 orang, alasan responden yaitu dari hasil pelaksanaan program seperti penyuluhan dan lainnya yang dilakukan oleh lurah sudah memperlihatkan hasil yang baik. Sedangkan responden yang memilih cukup baik sebanyak 0 orang. Kemudian responden yang

menyatakan kurang baik sebanyak 1 orang dengan alasan bahwa pelaksanaan program yang selama ini dilakukan oleh lurah tidak membuahkan hasil, seperti melakukan penyuluhan yang yang jarang sekali dilakukan.

Dengan demikian kesimpulan sementara tanggapan responden (pegawai) terhadap indikator efektivitas sebanyak 54% menyatakan cukup baik.

Selanjutnya penulis menyebarkan kuisioner kepada lembaga kemasyarakatan untuk mengetahui pandangan terhadap tugas lurah.

Tabel V.5. Tanggapan Responden (Lembaga Kemasyarakatan) Terhadap Efektivitas Program Yang Dilakukan Oleh Lurah Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Lembaga Kemasyarakatan Dikelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai

No.	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Kurang baik	
1.	Penetapan tujuan program	11	2	2	15
2.	Proses pelaksanaan	2	12	1	15
3.	Hasil pelaksanaan	14	1	0	15
	Jumlah	27	15	3	45
	Rata-rata	9	5	1	15
	Persentase	59%	35%	6%	100%

Sumber ; kantor lurah Bukit Batrem, 2019

Berdasarkan tabel V.5 diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden (lembaga kemasyarakatan) yang menyatakan baik pada penetapan tujuan program sebanyak 11 orang, dengan alasan responden yaitu menurut mereka selama ini

lurah sudah banyak menetapkan tujuan-tujuan program. Sedangkan yang menyatakan cukup baik sebanyak 2 orang, dengan alasan penetapan tujuan program yang ditetapkan oleh lurah kadang berubah-ubah. Kemudian responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 2 orang, dengan alasan penetapan tujuan program yang dibuat oleh lurah terkadang tidak jelas.

Pada item yang kedua yaitu proses pelaksanaan sebanyak 2 orang responden menyatakan baik, dengan alasan selama ini program yang sudah dibuat lurah berjalan dengan baik. Sedangkan yang menyatakan cukup baik sebanyak 12 orang, dengan alasan pelaksanaan program-program yang ada terpantau jarang dilaksanakan oleh lurah. Dan responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 1 orang, dengan alasan proses pelaksanaan yang dilakukan oleh lurah terkadang tidak efektif.

Dan pada item ketiga yaitu Hasil pelaksanaan dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan baik sebanyak 14 orang, dengan alasan selama ini lurah telah membuat program yang baik sehingga hasil dari program tersebut berjalan dengan baik. Sedangkan responden yang memilih cukup baik sebanyak 1 orang, dengan alasan proses pelaksanaan yang dilakukan oleh lurah kadang tidak berjalan dengan baik dan semestinya, dan yang menyatakan kurang baik sebanyak 0 orang.

Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap indikator efektifitas menurut responden (lembaga kemasyarakatan) sebanyak 59% menyatakan baik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis lakukan kepada Lurah Bukit Batrem mengenai efektifitas pelaksanaan tugas lurah dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan ;

“Saya selaku Lurah yang berwenang dalam membina lembaga kemasyarakatan telah menjalankan berbagai program-program pembinaan dan semuanya berjalan cukup baik, tapi masih banyak juga program-program yang kadang tidak terlaksana”. (Hasil wawancara tanggal 8 maret 2019)

Berdasarkan hasil kuisioner dan juga didukung dengan hasil wawancara pada efektifitas pelaksanaan tugas lurah dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga Kemasyarakatan kelurahan Bukit Batrem sebagian besar responden (pegawai) yaitu 54% menyatakan bahwa program ini cukup baik. Dan berdasarkan kuisioner kepada lembaga kemasyarakatan mengenai pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan sebagian besar responden (lembaga kemasyarakatan) yaitu 59% menyatakan bahwa program ini baik. Dengan demikian juga dari hasil observasi penulis menemukan dari hasil data kuisioner, data wawancara dan data observasi maka untuk indikator variabel efektifitas dapat dikategorikan cukup baik.

2. Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter efisiensi biasanya ditemukan melalui perhitungan biaya perunit produk atau layanan.

Tabel V.6. Tanggapan Responden (pegawai) Terhadap Efisiensi Program Yang Dilakukan Oleh Lurah Dalam Melakukan Pembinaan

Terhadap Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai

No.	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup	Kurang Baik	
1.	Ketepatan Sasaran	1	2	3	6
2.	Ketersediaan Dana	0	1	5	6
3.	Pengeluaran Dana	0	3	3	6
	Jumlah	1	6	11	18
	Rata-rata	1	2	3	6
	Persentase	6%	33%	61%	100%

Sumber; Olahan Data, 2019

Berdasarkan tabel V.6 diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden yang menyatakan baik pada ketepatan sasaran sebanyak 1 orang, adapun alasan responden (pegawai) yaitu sasaran yang ingin dicapai sudah tepat dan sesuai dengan yang di inginkan. Selanjutnya yang menyatakan cukup baik sebanyak 2 orang, adapun alasannya yaitu lurah dinilai kurang tepat sasaran dalam memberikan dana kepada lembaga kemasyarakatan, seperti kurangnya lurah memberikan dana untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kelurahan bukit Batrem. Sedangkan responden yang memilih kurang baik sebanyak 3 orang, adapun alasan nya yaitu lurah kurang tepat sasaran dalam memberikan dana untuk lembaga yang dimaksud.

Pada item yang kedua dapat diketahui bahwa tanggapan responden yang menyatakan baik pada ketersediaan dana sebanyak 0 orang. Sedangkan responden yang menyatakan cukup baik sebanyak 1 orang, alasan responden yaitu

pembinaan dapat dimaksimalkan jika ketersediaan dana sesuai dengan anggaran yang ada, tetapi disini ketersediaan dana kurang cukup. Sedangkan yang menyatakan kurang baik sebanyak 5 orang. Dengan alasan responden yaitu dana yang selama ini diberikan oleh pemerintah kurang dari yang dibutuhkan.

Dan pada item yang ketiga dapat diketahui tanggapan responden yang menyatakan baik pada pengeluaran dana yaitu sebanyak 0 orang. Sedangkan responden yang memilih cukup baik sebanyak 3 orang. Dengan alasan responden yaitu dana yang tersedia saja kurang, jadi harus menghemat untuk pengeluaran dana. Kemudian responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 3 orang dengan alasan tidak adanya dana yang cukup untuk kelurahan bukit batrem, jadi untuk pengeluaran dana dikatakan jarang.

Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap tanggapan responden (pegawai) pada indikator efisiensi sebanyak 61% menyatakan kurang baik.

Selanjutnya penulis juga menyebarkan kuisioner masyarakat mengenai Tugas Lurah Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai adalah sebagai berikut ;

Tabel V.7. Tanggapan Responden (lembaga kemasyarakatan) Terhadap Efisiensi Program Yang Dilakukan Oleh Lurah Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Lembaga Kemasyarakatan Dikelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai

No.	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Kurang baik	

1.	Ketepatan sasaran	0	15	0	15
2.	Ketersediaan dana	0	14	1	15
3.	Pengeluaran dana	3	8	4	15
	Jumlah	3	37	5	45
	Rata-rata	1	12	2	15
	Persentase	7%	82%	11%	100%

Sumber ; *Olahan Data, 2019*

Berdasarkan tabel V.7 diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden (lembaga kemasyarakatan) yang menyatakan baik pada penetapan tujuan program sebanyak 0 orang. Sedangkan yang menyatkan cukup baik sebanyak 15 orang, dengan alasan dana yang selama ini cukup untuk lembaga kemasyarakatan dan tepat sasaran. Kemudian responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 0 orang.

Pada item yang kedua yaitu ketersediaan dana sebanyak 0 orang responden menyatakan baik. Sedangkan yang menyatakan cukup baik sebanyak 14 orang, dengan alasan ketersediaan dana untuk lembaga kemasyarakatan terbilang kurang cukup, karna saat ada kegiatan biasanya dana selalu kurang. Dan responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 1 orang, dengan alasan dana sangat minim sekali.

Dan pada item ketiga yaitu pengeluaran dana dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan baik sebanyak 3 orang, dengan alasan responden selama ini penegeluaran dana yang dikeluarkan oleh kelurahan sudah cukup membantu lembaga kemasyarakatan. Sedangkan responden yang memilih cukup baik sebanyak 8 orang, dengan alasan responden pengeluaran dana yang dikeluarkan oleh kelurahan cukup membantu lembaga kemasyarakatan. Dan yang

menyatakan kurang baik sebanyak 4 orang, dengan alasan responden yaitu pengeluaran dana yang minim.

Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap tanggapan responden (lembaga kemasyarakatan) pada indikator efisiensi sebanyak 82% menyatakan cukup baik.

Berdasarkan wawancara kepada kepala Kelurahan Bukit Batrem, Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, menyatakan bahwa:

“Setiap program yang telah saya buat dan ditetapkan adalah program yang disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan Bukit Batrem, setelah program dibuat biasanya Kelurahan Bukit Batrem Mengajukan Dana dari APBD, maka kami harus menunggu dana tersebut cair, yang nantinya akan kami pergunakan untuk menjalankan program-program yang ada, terkadang dana yang disediakan oleh APBD sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan program”. (Hasil Wawancara tanggal 8 maret 2019)

Berdasarkan hasil kuisisioner dan juga didukung dengan hasil wawancara pada efisiensi pelaksanaan tugas lurah dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dikelurahan bukit batrem sebagian besar responden (pegawai) yaitu 61% menyatakan bahwa program ini kurang baik. Dan berdasarkan kuisisioner kepada anggota lembaga kemasyarakatan mengenai pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan sebagian besar responden (anggota lembaga kemasyarakatan) yaitu 82% menyatakan program ini cukup baik. Dengan demikian juga dari hasil observasi penulis menemukan dari hasil data kuisisioner data wawancara dan data observasi maka untuk indikator variabel efisiensi dapat dikategorikan cukup baik.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang membutuhkan adanya masalah.

Tabel V.8. Tanggapan Responden (pegawai) Terhadap Kucukupan Program Yang Dilakukan Oleh Lurah Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Lembaga Kemasyarakatan Dikelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai

No.	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Kurang baik	
1.	Kecukupan sarana dan prasarana	0	1	5	6
2.	Kesiapan pelaksanaan program	0	2	4	6
	Jumlah	0	3	9	12
	Rata-rata	0	2	4	6
	Persentase	0%	25%	75%	100%

Sumber ; olahan data, 2019

Berdasarkan tabel V.8 diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden (pegawai) yang menyatakan baik pada kecukupan sarana dan prasarana sebanyak 0 orang. Selanjutnya yang menyatakan cukup baik sebanyak 1 orang, adapun alasan responden yaitu sarana dan prasarana yang ada dikelurahan bukit batrem kurang memadai untuk lembaga kemasyarakatan. Sedangkan responden yang memilih kurang baik sebanyak 5 orang, adapun alasan responden yaitu sangat kurang memadai sarana dan prasarana yang ada dikelurahan bukit batrem,

sehingga lembaga kemsayarakatan tidak memiliki kantor untuk melakukan kegiatan.

Pada item yang kedua dapat diketahui bahwa tanggapan responden yang menyatakan baik pada kesiapan pelaksanaan program sebanyak 0 orang, Sedangkan responden yang menyatakan cukup baik sebanyak 2 orang, alasan responden yaitu selama ini untuk kesiapan program-program yang dibuat oleh Lurah selalu siap dilaksanakan. Sedangkan yang menyatakan kurang baik sebanyak 4 orang. Dengan alasan responden kurang siap dalam melaksanakan program yang sudah dicanangkan.

Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap tanggapan responden (pegawai) pada indikator kecukupan sebanyak 75% menyatakan kurang baik.

Selanjutnya penulis menyebarkan kuisisioner kepada masyarakat, dapat dilihat dalam tabel berikut ;

Tabel V.9. Tanggapan Responden (lembaga kemasyarakatan) Terhadap Kecukupan Program Yang Dilakukan Oleh Lurah Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Lembaga Kemasyarakatan Dikelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai

No.	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Kurang baik	
1.	Kecukupan sarana dan prasarana	3	11	1	15
2.	Kesiapan pelaksanaan program	6	8	1	15
Jumlah		9	19	2	30
Rata-rata		5	9	1	15

Persentase	30%	63%	7	100%
-------------------	------------	------------	----------	-------------

Sumber ; olahan data, 2019

Berdasarkan tabel V.9 diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden (lembaga kemasyarakatan) yang menyatakan baik pada kecukupan sarana dan prasarana sebanyak 3 orang, dengan alasan responden yaitu sarana dan prasarana yang ada di kelurahan Bukit Batrem tersedia seperti kantor kelurahan, aula, lapangan dan tenda sudah cukup untuk melaksanakan kegiatan dan bisa digunakan untuk rapat dan lain-lain. Selanjutnya yang menyatakan cukup baik sebanyak 11 orang, adapun alasan responden yaitu sarana dan prasarana yang ada di kelurahan bukit batrem kurang memadai untuk lembaga kemasyarakatan sehingga kegiatan lain tidak dapat terlaksana dengan baik. Sedangkan responden yang memilih kurang baik sebanyak 1 orang, adapun alasan responden yaitu sangat kurang memadai sarana dan prasarana yang ada di kelurahan bukit batrem, sehingga lembaga kemsayarakatan tidak memiliki kantor untuk melakukan rapat atau pertemuan.

Pada item yang kedua dapat diketahui bahwa tanggapan responden yang menyatakan baik pada kesiapan pelaksanaan program sebanyak 6 orang, dengan alasan responden yaitu lurah selalu siap dalam pelaksanaan program. Sedangkan responden yang menyatakan cukup baik sebanyak 8 orang, dengan alasan responden yaitu selama ini untuk kesiapan program-program yang dibuat oleh Lurah dinilai cukup dalam melaksanakan. Sedangkan yang menyatakan kurang baik sebanyak 1 orang. Dengan alasan responden yaitu lurah kurang siap dalam melaksanakan program yang sudah dibuat.

Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap tanggapan responden (lembaga kemasyarakatan) pada indikator kecukupan sebanyak 63% menyatakan cukup baik.

Berdasarkan wawancara dengan Lurah Bukit Batrem menyatakan bahwa :

”Kelurahan Bukit Batrem sangat-sangat memerlukan baik itu sarana ataupun prasarana, dan mengenai kecukupan sarana dan prasarana di kelurahan ini sendiri kurang memadai, bisa dikatakan pada saat melakukan pertemuan kepada lembaga kemasyarakatan, kami tidak lakukan didalam kantor lurah, ya seperti yang anda lihat sekarang, kami duduk dikios-kios sekitar kelurahan Bukit Batrem ini, pada intinya untuk kecukupan sarana dan prasarana saya kira cukup baik” (Hasil wawancara tanggal 8 maret 2019)

Berdasarkan hasil kuisioner kepada responden dan juga didukung dengan hasil wawancara pada kecukupan pelaksanaan tugas lurah dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di kelurahan Bukit Batrem kecamatan Dumai Timur kota Dumai sebagian besar responden (pegawai) menyatakan 75 % bahwa program ini kurang baik. Berdasarkan kuisioner kepada responden (lembaga kemasyarakatan) menyatakan 63% cukup baik, Dengan demikian dari hasil observasi penulis menemukan dari hasil data kuisioner, data wawancara dan data observasi, maka untuk indikator variabel kecukupan dapat dikategorikan kurang baik.

4. Perataan

Perataan dalam sebuah pelaksanaan kegiatan dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesatuan (equity) erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial

dan menunjukkan pada distribusi akibat dan usaha anantara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

Tabel V.10. Tanggapan Responden (pegawai) Terhadap Perataan Program Yang Dilakukan Oleh Lurah Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Lembaga Kemasyarakatan Dikelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai

No.	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Kurang baik	
1.	Pemberian pelayanan	5	1	0	6
2.	Pelaksanaan pelayanan	5	1	0	6
	Jumlah	10	2	0	12
	Rata-rata	5	1	0	6
	Persentase	83%	17%	0%	100%

sumber : olahan data, 2019

Berdasarkan tabel V.10 diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden (pegawai) yang menyatakan baik pada pemberian pelayanan sebanyak 5 orang. Dengan alasan responden untuk pemberian pelayanan yang diberikan oleh lurah sangat-sangat baik dan merata, sehingga jika ada keluhan-keluhan dari lembaga kemasyarakatan maka lurah akan cepat tanggap. Selanjutnya yang menyatakan cukup baik sebanyak 1 orang, adapun alasan responden yaitu pemberian pelayanan yang diberikan lurah kurang merata. Sedangkan responden yang memilih kurang baik sebanyak 0 orang

Pada item yang kedua dapat diketahui bahwa tanggapan responden yang menyatakan baik pada pelaksanaan pelayanan sebanyak 5 orang, dengan alasan responden yaitu pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh lurah sangat baik,

seperti saat ada masyarakatan yang sakit maka lurah akan cepat tanggap. Sedangkan responden yang menyatakan cukup baik sebanyak 1 orang, alasan responden yaitu selama ini untuk pelaksanaan pelayanan yang dibuat oleh Lurah kurang dilaksanakan. Sedangkan yang menyatakan kurang baik sebanyak 0 orang.

Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap tanggapan responden (pegawai) pada indikator perataan sebanyak 83% menyatakan baik.

Selanjutnya penulis menyebarkan kuisioner kepada lembaga kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

Tabel V.11. Tanggapan Responden (lembaga kemasyarakatan) Terhadap Perataan Program Yang Dilakukan Oleh Lurah Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Lembaga Kemasyarakatan Dikelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai

No.	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Kurang baik	
1.	Pemberian pelayanan	11	3	1	15
2.	Pelaksanaan pelayanan	8	6	1	15
	Jumlah	19	9	2	30
	Rata-rata	9	5	1	15
	Persentase	53%	30%	7%	100%

Sumber : Olahan data, 2019

Berdasarkan tabel V.11 diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden (lembaga kemasyarakatan) yang menyatakan baik pada pemberian pelayanan sebanyak 11 orang. Dengan alasan responden untuk pemberian pelayanan yang diberikan oleh lurah sangat merata, tidak memandang satu sama lain sehingga jika ada keluhan-keluhan dari lembaga kemasyarakatan maka lurah akan cepat

tanggap. Selanjutnya yang menyatakan cukup baik sebanyak 3 orang, adapun alasan responden yaitu pemberian pelayanan yang diberikan lurah kurang merata. Sedangkan responden yang memilih kurang baik sebanyak 1 orang dengan alasan responden lurah kurang memperhatikan masyarakat.

Pada item yang kedua dapat diketahui bahwa tanggapan responden yang menyatakan baik pada pelaksanaan pelayanan sebanyak 8 orang, dengan alasan responden yaitu pelaksanaan pelayanan yang dilakukan lurah sangat baik. Sedangkan responden yang menyatakan cukup baik sebanyak 6 orang, alasan responden yaitu selama ini untuk pelaksanaan pelayanan yang dibuat oleh Lurah kurang dilaksanakan. Sedangkan yang menyatakan kurang baik sebanyak 1 orang dengan alasan responden yaitu lurah memperhatikan keluhan lembaga kemasyarakatan.

Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap tanggapan responden (lembaga kemasyarakatan) pada indikator perataan sebanyak 53% menyatakan baik.

Berdasarkan wawancara kepada Lurah Bukit Batrem mengenai perataan pada program pelaksanaan tugas lurah dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dikelurahan Bukit Batrem menyatakan bahwa :

“Saya rasa untuk pemberian pelayanan dan pelaksanaan pelayanan sudah sangat semaksimal mungkin saya lakukan, namun apabila terlihat kurang merata bisa saja dari Koordinator yang kurang maksimal atau dana yang kurang memadai untuk memfasilitasi semuanya”. (Hasil wawancara tanggal 8 Maret 2018)

Berdasarkan hasil kuisioner kepada responden juga didukung dengan hasil wawancara pada perataan program pelaksanaan tugas lurah dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dikelurahan Bukit Batrem dalam

membina lembaga kemasyarakatan, sebagian besar responden (pegawai) menyatakan 83% bahwa program ini baik. Berdasarkan hasil kuisioner kepada responden (lembaga kemasyarakatan) menyatakan baik yaitu 53%. Dengan demikian juga hasil dari data kuisioner, data wawancara dan data Observasi, maka untuk indikator variabel perataan dapat dikategorikan baik.

5. Responsivitas

Responsivitas dalam sebuah pelaksanaan program dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan.

Tabel V.12. Tanggapan Responden (pegawai) Terhadap Responsivitas Program Yang Dilakukan Oleh Lurah Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Lembaga Kemasyarakatan Dikelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai

No.	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Ketepatan sasaran	4	1	1	6
2.	Koordinasi Pelaksanaan	5	0	1	6
	Jumlah	9	1	2	12
	Rata-rata	4	1	1	6
	Persentase	75%	8%	17%	100%

Sumber : Olahan Data 2019

Berdasarkan tabel V.12 diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden (pegawai) yang menyatakan baik pada ketepatan sasaran sebanyak 4 orang. Dengan alasan responden untuk ketepatan sasaran sudah tepat yaitu pada lembaga kemasyarakatan sudah mendapat respon yang baik, setiap program yang dibuat lurah maka lembaga kemasyarakatan langsung merespon dengan baik.

Selanjutnya yang menyatakan cukup baik sebanyak 1 orang, dengan alasan responden yaitu lurah sudah cukup baik dan tepat sasaran dalam mengkoordinasi pelaksanaan sehingga lembaga masyarakat merespon dengan cukup baik. Sedangkan responden yang memilih kurang baik sebanyak 1 orang dengan alasan responden, lurah kurang memberikan koordinasi sehingga lembaga kemasyarakatan kurang merespon.

Pada item yang kedua dapat diketahui bahwa tanggapan responden yang menyatakan baik pada pelaksanaan pelayanan sebanyak 5 orang, dengan alasan responden yaitu pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh lurah sangat baik, seperti saat ada masyarakat yang sakit maka lurah akan cepat tanggap. Sedangkan responden yang menyatakan cukup baik sebanyak 0 orang. Sedangkan yang menyatakan kurang baik sebanyak 1 orang, dengan alasan responden yaitu selama ini untuk pelaksanaan pelayanan yang dibuat oleh Lurah kurang dilaksanakan.

Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap tanggapan responden (pegawai) pada indikator responsivitas sebanyak 75% menyatakan baik.

Selanjutnya penulis menyebar kuisioner kepada lembaga kemasyarakatan :

Tabel V.13. Tanggapan Responden (lembaga kemasyarakatan) Terhadap Responsivitas Program Yang Dilakukan Oleh Lurah Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Lembaga Kemasyarakatan Dikelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai

No.	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Ketepatan sasaran	6	8	1	15

2.	Koordinasi pelaksanaan	9	6	0	15
	Jumlah	15	14	1	30
	Rata-rata	7	7	1	15
	Persentase	50%	47%	3%	100%

Sumber : data olahan, 2019

Berdasarkan tabel V.13 diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden (lembaga kemasyarakatan) yang menyatakan baik pada ketepatan sasaran sebanyak 6 orang. Dengan alasan responden untuk ketepatan sasaran sudah tepat yaitu pada lembaga kemasyarakatan sudah mendapat respon yang baik, setiap program yang dibuat lurah maka lembaga kemasyarakatan langsung merespon dengan baik. Selanjutnya yang menyatakan cukup baik sebanyak 8 orang, dengan alasan responden yaitu lurah sudah cukup baik dan tepat sasaran dalam mengkoordinasi pelaksanaan sehingga lembaga masyarakat merespon dengan cukup baik. Sedangkan responden yang memilih kurang baik sebanyak 1 orang dengan alasan responden, lurah kurang memberikan koordinasi sehingga lembaga kemasyarakatan kurang merespon.

Pada item yang kedua dapat diketahui bahwa tanggapan responden yang menyatakan baik pada pelaksanaan pelayanan sebanyak 9 orang, dengan alasan responden yaitu pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh lurah sangat baik, seperti saat ada masyarakatan yang sakit maka lurah akan cepat tanggap. Sedangkan responden yang menyatakan cukup baik sebanyak 6 orang, dengan alasan responden yaitu selama ini untuk pelaksanaan pelayanan yang dibuat oleh Lurah cukup dilaksanakan. Sedangkan yang menyatakan kurang baik sebanyak 0 orang.

Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap tanggapan responden (lembaga kemasyarakatan) pada indikator responsivitas sebanyak 50% menyatakan baik.

Berdasarkan wawancara terkait program pelaksanaan Lurah bukit batrem menyatakan bahwa :

“Menurut saya tujuan program-program yang telah saya lakukan sudah tepat sasaran, beberapa program yang telah saya lakukan sudah mencapai target yang diinginkan, namun terdapat beberapa program yang telah saya buat sedemikian rupa, namun belum terlaksana sepenuhnya. Secara keseluruhan baik tujuan program, serta pelaksanaannya sudah dapat dikatakan cukup baik” (Hasil wawancara tanggal 8 maret 2019)

Berdasarkan hasil kuisioner dan juga didukung dengan hasil wawancara terkait responsivitas pelaksanaan pada program tugas lurah dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dikelurahan Bukit Batrem dalam membina lembaga kemasyarakatan sebagian responden (pegawai) sebanyak 75% menyatakan baik, dan responden (lembaga kemasyarakatan) sebanyak 50% menyatakan baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa indikator responsivitas pelaksanaan tugas lurah dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dikelurahan Bukit Batrem dikategorikan baik.

6. Ketepatan

Ketepatan merujuk kepada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak.

Tabel V.14. Tanggapan Responden (pegawai) Terhadap ketepatan Program Yang Dilakukan Oleh Lurah Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Lembaga Kemasyarakatan Dikelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai

No.	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		baik	Cukup baik	Kurang baik	
1.	Keberhasilan tujuan	5	0	1	6
2.	Pengkoordinasian program	5	0	1	6
	Jumlah	10	0	2	12
	Rata-rata	5	0	1	6
	Persentase	83%	0	17%	100%

Sumber : olahan data 2019

Berdasarkan tabel V.14 diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden (pegawai) yang menyatakan baik pada pemberian pelayanan sebanyak 5 orang. Dengan alasan responden untuk keberhasilan tujuan bisa dikatakan sudah baik, karna setiap program-program yang dibuat lurah sudah berjalan, seperti melakukan gotong royong setiap hari jumat. Selanjutnya yang menyatakan cukup baik sebanyak 0 orang. Sedangkan responden yang memilih kurang baik sebanyak 1 orang dengan alasan responden jarang ada kegiatan bakti sosial dikelurahan bukit batrem.

Pada item yang kedua dapat diketahui bahwa tanggapan responden yang menyatakan baik pada pelaksanaan pelayanan sebanyak 5 orang, dengan alasan responden yaitu untuk pengkoordinasian program, biasanya lurah langsung menyampaikan langsung ke lembaga yang dimaksudkan tanpa perantara, agar jelas intruksinya. Sedangkan responden yang menyatakan cukup baik sebanyak 0

orang. Sedangkan yang menyatakan kurang baik sebanyak 1 orang, dengan alasan responden yaitu lurah jarang sekali menyampaikan langsung program-program yang akan dilaksanakan, kadang hanya menyuruh staf nya saja.

Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap tanggapan responden (pegawai) pada indikator ketepatan sebanyak 83% menyatakan baik.

Selanjutnya penulis menyebarkan kuisioner kepada lembaga kemasyarakatan :

Tabel V.15. Tanggapan Responden (lembaga kemasyarakatan) Terhadap Ketepatan Program Yang Dilakukan Oleh Lurah Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Lembaga Kemasyarakatan Dikelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Kurang baik	
1	Keberhasilan tujuan	10	5	0	15
2	Pengkoordinasian program	5	10	0	15
	Jumlah	15	15	0	30
	Rata-rata	7	8	0	15
	Persentase	50%	50%	0	100%

Sumber : olahan data 2019

Berdasarkan tabel V.15 diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden (lembaga kemasyarakatan) yang menyatakan baik pada keberhasilan tujuan sebanyak 10 orang. Dengan alasan responden yaitu untuk hasil pelaksanaan program yang dibuat lurah, sampai saat ini berjalan dengan baik, melakukan penyuluhan kemasyarakatan-masyarakat. Selanjutnya yang menyatakan cukup baik sebanyak 5 orang, dengan alasan responden yaitu untuk keberhasilan program

masuk beberapa saja, seperti melakukan rapat antara lurah dan kelembagaan yang dimaksud masih jarang sekali. Dan yang memilih kurang baik sebanyak 0 orang.

Pada item yang kedua dapat diketahui bahwa tanggapan responden yang menyatakan baik pada pengkoordinasian program sebanyak 5 orang, dengan alasan responden yaitu pengkoordinasian program yang dilakukan oleh lurah sangat baik, seperti saat ada kegiatan lurah langsung turun tangan dan menyampaikan kepada lembaga yang dimaksud. Sedangkan responden yang menyatakan cukup baik sebanyak 10 orang, dengan alasan responden yaitu selama ini untuk pengkoordinasian program, lurah kurang cepat tanggap, sering mengulur waktu. Sedangkan yang menyatakan kurang baik sebanyak 0 orang

Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap tanggapan responden (lembaga kemasyarakatan) pada indikator ketepatan sebanyak 50% menyatakan baik.

Berdasarkan wawancara terkait program pelaksanaan Lurah Bukit Batrem menyatakan bahwa :

“Saya rasa keberhasilan tujuan dan pengkoordinasian program yang sudah saya lakukan sudah cukup baik”. (Hasil wawancara tanggal 8 maret 2019)

Berdasarkan hasil kuisioner dan juga didukung dengan hasil wawancara pada ketepatan pelaksanaan program tugas lurah dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Bukit Batrem dalam membina lembaga kemasyarakatan sebagian responden 83% menyatakan baik. Sedangkan sebagian besar responden (lembaga kemasyarakatan) 50% menyatakan baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa indikator ketepatan pelaksanaan tugas lurah

dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dikelurahan Bukit Batrem dikategorikan baik.

Berikut ini adalah rekapitulasi Pelaksanaan tugas lurah dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dikelurahan Bukit Batrem.

Tabel V.16. Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Lembaga Kemasyarakatan Dikelurahan Bukit Batrem.

No.	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Kurang baik	
1.	Efektivitas	13	6	2	21
2.	Efisiensi	2	14	5	21
3.	Kecukupan	5	11	5	21
4.	Perataan	14	6	1	21
5.	Responsivitas	11	8	2	21
6.	Ketepatan	12	8	1	21
Jumlah		57	53	16	126
Rata-rata		9	9	3	21
Persentase		45%	42%	13%	100%

Sumber: olahan data 2019

Berdasarkan tabel V.16 diatas dapat diketahui bahwa rekapitulasi tanggapan responden mengenai pelaksanaan tugas lurah dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan adalah dari 21 orang dijadikan sebagai responden sebanyak 9 orang (45%) menyatakan baik, sebanyak 9 orang (42%) menyatakan cukup baik, dan sebanyak 3 orang (13%) menyatakan kurang baik.

Maka dari hasil rekapitulasi diatas dapat disimpulkan bahwasannya pelaksanaan tugas lurah dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga

kemasyarakatan dikelurahan Bukit Batrem dapat dikatakan baik dapat dilihat dari 6 indikator yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan dengan memperoleh hasil rekapitulasi tertinggi yaitu 45%. dimana pihak lurah dalam melaksanakan tugasnya dalam membina lembaga kemasyarakatan sudah dinilai maksimal.

Dan dilihat dari keseluruhan data dapat disimpulkan berdasarkan kuisioner, wawancara, dan observasi yang penulis lakukan terhadap Lurah Bukit Batrem, lembaga kemasyarakatan dan pegawai kantor lurah serta observasi yang penulis lakukan dilapangan dapat dikategorikan “cukup baik”.

7. Faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas lurah dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dikelurahan Bukit Batrem kecamatan Dumai Timur kota Dumai.

Beberapa faktor penghambat Lurah Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bukit Batrem adalah :

- a. Masih kurangnya sarana dan prasarana seperti kantor untuk lembaga kemasyarakatan dikelurahan Bukit Batrem, hanya ada 1 gedung yaitu Aula yang kadang di pakai untuk rapat, dan pada saat aula tersebut digunakan untuk acara lain, maka saat lembaga kemasyarakatan akan melakukan kegiatan atau rapat mereka tidak ada tempat sehingga mereka melakukan kegiatan/pertemuan yaitu di kios sekitar Kelurahan Bukit Batrem.
- b. Kurangnya dana atau anggaran yang diberikan oleh Pemerintah untuk Kelurahan Bukit Batrem sehingga sarana dan prasarana kurang memadai,

seperti pembangunan kantor untuk lembaga kemasyarakatan, dan kurangnya biaya untuk melaksanakan kegiatan

“sampai saat ini saja masyarakat masih melakukan sumbangsi untuk beberapa kegiatan yang akan kami lakukan” (hasil wawancara dengan Lurah Bukit Batrem)



BAB VI

PENUTUP

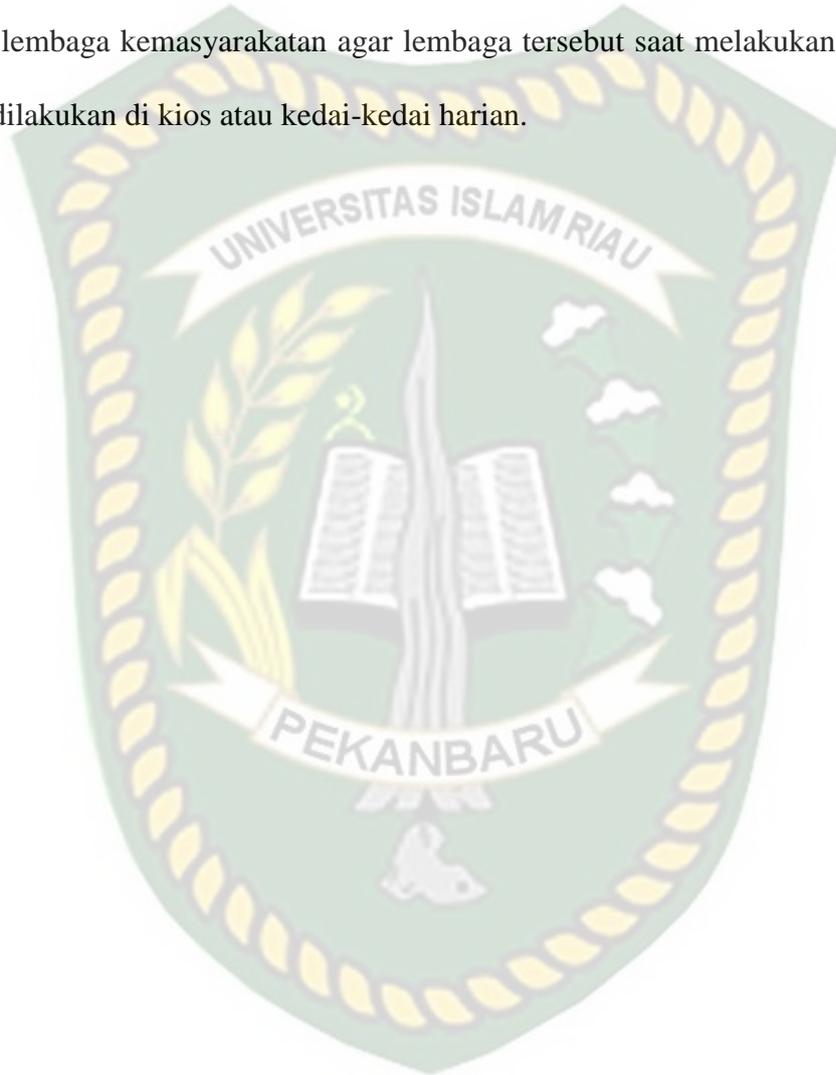
A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penulis mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Sesuai dengan teknik pengukuran yang penulisan gunakan hasil kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas lurah dalam melakukan pembinaan lembaga kemasyarakatan dapat dikatakan Cukup Baik dilihat dari enam indikator yaitu, efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan dengan memperoleh hasil rekapitulasi sebanyak 45%
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas lurah dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan adalah kurangnya sarana dan prasarana bagi lembaga kemasyarakatan, seperti kantor lembaga kemasyarakatan kelurahan untuk lembaga tersebut, meskipun demikian anggota lembaga kemasyarakatan melakukan pekerjaan semaksimal mungkin dengan sarana yang ada, dan juga masih kurangnya dana/anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk kelurahan tersebut, sehingga Lurah kurang dalam menyediakan sarana dan prasarana, dan menjadi penghambat bagi anggota lembaga kemasyarakatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan.

B. Saran

Kepada Lurah kelurahan Bukit Batrem agar menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan seperti gedung atau kantor lembaga kemasyarakatan kelurahan untuk lembaga kemasyarakatan agar lembaga tersebut saat melakukan pertemuan tidak dilakukan di kios atau kedai-kedai harian.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Ardana, Dkk. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Pertama, Graha Ilmu press. Yogyakarta.
- Bedjo, Siswanto. 2005. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia pendekatan Administratif dan Operasional*. Jakarta: Bumi Aksara
- Dunn, William N. 2003. *Analisi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Gibson, J.L., J.M. Ivancevich, & J.H. Donnelly. 1993. *Organizations, Behavior, Structure, Processes*. Dialih bahasakan oleh Djoerban Wahid. Jakarta: Erlangga.
- Hadari Nawawi. 2005. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University press.
- Handyaningrat. *Pengantar Studi Ilmu Administratif dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media.
- Mathis, Robert L. Johnson H Jackson. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Penerbit Salemba 4.
- Masruri. 2014. *Analisis Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan*. Padang : Akademia Permata.
- Martoyo. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi kedelapan*. BPFE. Yogyakarta.

- Mohammad Syarif Sumantri. 2015. *Strategi Pembelajaran : Teori dan Praktik di Tingkat Pendidikan Dasar*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Ndraha, Taliziduhu. 2002. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta, Rineke Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Teori Budaya Organisasi*. Rineke Cipta, Jakarta.
- Poernomo, Mangku. 2004. *Pembaruan Desa mencari Bentuk Penataan Produksi Desa*. Lapera Pustaka Utama: Yogyakarta.
- Prijono dan Pranarka. 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta.
- Purwanto.2002. *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sedarmayanti. 1998. *Pengembangan Organisasi*. PT. Rosda Karya, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 2000. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rineke Cipta, Jakarta.
- Siagian. 2003. *Administrasi Pembangunan: Konsep Dimensi dan Strateginya*. Jakarta Bumi Aksara.
- Sugiyono.2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet.
- Sumadiningrat. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring*. PT. Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Politik*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Thoha, Miftah. 2002. *Pembinaan Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zeitmal. 1990. *Delivering Quality*. Free Press A Division of Macmillan inc

B. Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Tugas Lurah.

Peraturan Walikota Dumai Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Tugas Lurah.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kelurahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman

Penataan Lembaga Kemasyarakatan.





SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 1180 /A_ UIR/5-FS/2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Dean Irawan
NPM : 137310043
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Melakukan
Pembinaan Terhadap Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan
Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai
Persentase Plagiasi : 14%
Jumlah Halaman : 84 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)
Status : Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi,
dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 11 Mei 2019

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bfd. Akademik

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si
NPK. 160702589